

**KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN REPRESENTASI
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF KABUPATEN PIDIE
PERIODE 2019-2024**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**FATIMAH
NIM. 180801043**

**Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023/2024**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fatimah
NIM : 180801043
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

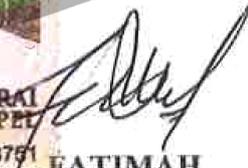
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Yang Menyatakan


FATIMAH

NIM. 180801043

**KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN REPRESENTASI
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF KABUPATEN PIDIE
PERIODE 2019-2024**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

Fatimah

NIM. 180801043

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y



Rizkika Lhena Darwin, M.A

NIP. 198812072018032001



Melly Masni, M.I.R

NIP. 199305242020122016

**KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN REPRESENTASI
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF KABUPATEN PIDIE
PERIODE 2019-2024**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

Fatimah
NIM. 180801043

Pada Hari/ Tanggal : 20 Agustus 2024

15 Safar 1446 H

Darussalam – Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

Sekretaris


Melly Mashri, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Penguji I


Aklima, M.A
NIP. 198810062019032009

Penguji II


Dani Akbar Takwadin, B.IAM., M.Sc
NIP. 19890408202321102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kepercayaan Masyarakat Dan Peningkatan Representasi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Kabupaten Pidie Periode 2019-2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif perempuan di DPRK Kabupaten Pidie Periode 2019-2024 dan bagaimana strategi politisi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dan wawancara menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif perempuan di DPRK Kabupaten Pidie Periode 2019-2024 sangat penting karena dapat mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan yang dihasilkan oleh DPRK Kabupaten Pidie. Keterwakilan perempuan di DPRK Kabupaten Pidie dapat memastikan bahwa perspektif, kebutuhan dan aspirasi perempuan diwakili secara merata dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dengan adanya perempuan di DPRK Pidie, dapat membuka peluang bagi adanya kebijakan yang lebih inklusif dan progresif terkait isu-isu gender seperti hak reproduksi, perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender. Sedangkan strategi politisi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap caleg perempuan di DPRK Pidie yaitu dengan meningkatkan kualitas calon anggota legislatif perempuan, meningkatkan kemampuan calon anggota legislatif perempuan, berusaha melakukan tugas dan wewenang semaksimal mungkin dan melakukan pendidikan kesetaraan gender yang komprehensif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memasukkan muatan kesetaraan gender pada kurikulum institusi pendidikan. Dan ada tiga bentuk strategi yang penulis temukan di lapangan yaitu pembentukan tim sukses atau relawan, pelaksanaan kampanye dan sosialisasi program kerja. Dan juga diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam kepemimpinan.

Kata Kunci: Kepercayaan Masyarakat, Representasi Keterwakilan Perempuan

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kepercayaan Masyarakat Dan Peningkatan Representasi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Kabupaten Pidie Periode 2019-2024**”. Shalawat beriringi salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah Shalallahu“alaihiwasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis milik. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi batu loncatan bagi penulis untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta jajarannya.
3. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Ramzi Murziqin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta jajarannya.
5. Melly Masni, M.I.R, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

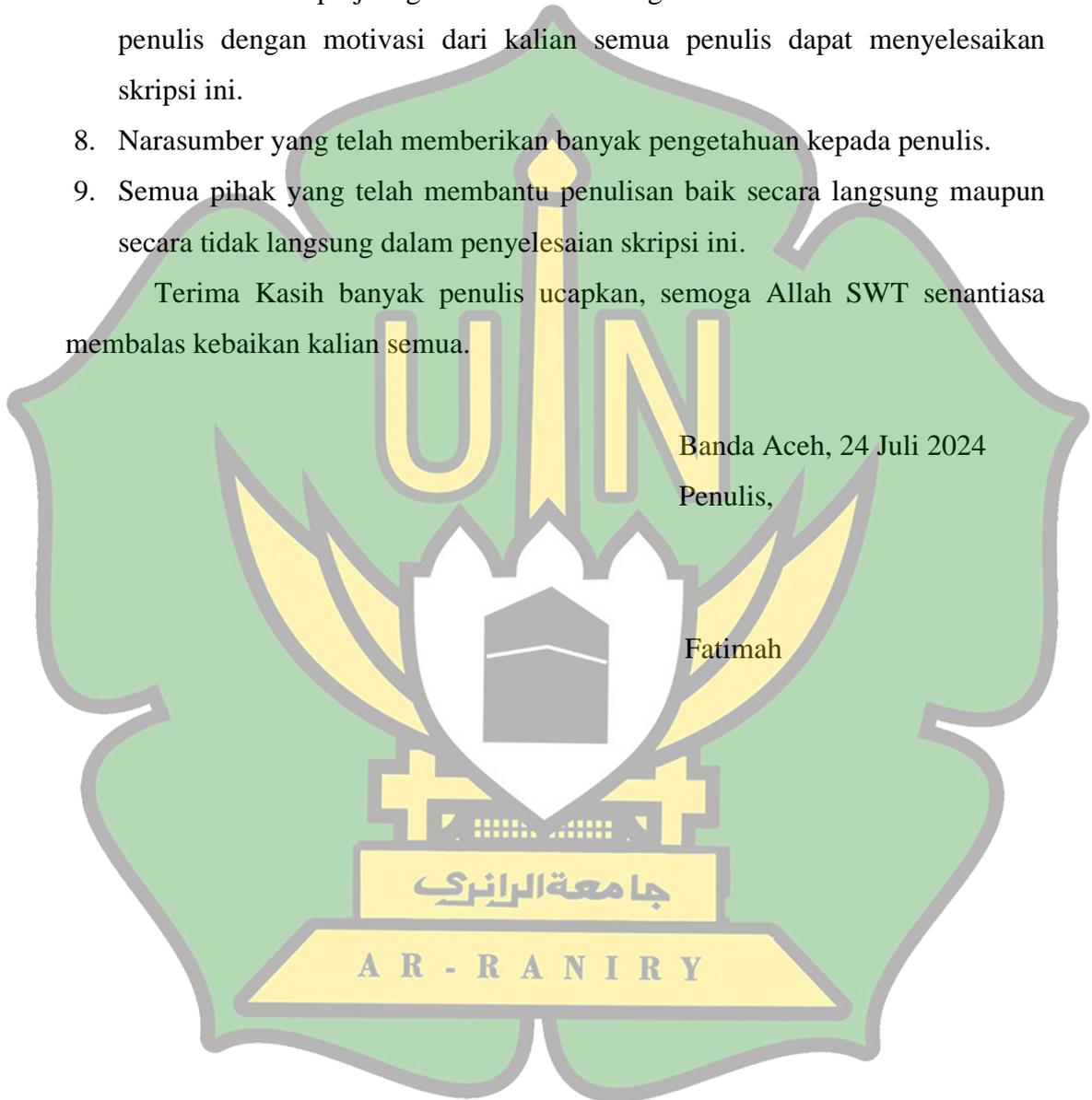
6. Terima Kasih kepada ibunda tercinta Cut Puteh dan ayah saya Bukhri Ahmad dan kakak dan adik saya serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan doa yang terus mengalir kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Angkatan 2018 dan sahabat-sahabat penulis dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 24 Juli 2024

Penulis,

Fatimah



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	12
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Kepercayaan Politik (<i>Political Trust</i>)	14
2.2.2 Strategi Yang Dilakukan Mempengaruhi Kepercayaan Politik.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Pendekatan Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.5 Informan Penelitian.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
3.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data).....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Pidie: Gambaran Sosial Budaya dan Relasi Gender.....	35
4.3 Strategi Politisi Perempuan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat	50
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
A. BUKU	64
B. JURNAL/SKRIPSI	64
C. WEBSITE	65
D. WAWANCARA.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Anggota DPRK Pidie periode 2014-2019 Dapil 1.....	3
Tabel 1.2 Daftar Nama Anggota DPRK Pidie periode 2014-2019 Dapil 2.....	3
Tabel 1.3 Daftar Nama Anggota DPRK Pidie periode 2014-2019 Dapil 3.....	4
Tabel 1.4 Daftar Nama Anggota DPRK Pidie periode 2014-2019 Dapil 4.....	4
Tabel 1.5 Daftar Nama Anggota DPRK Pidie periode 2014-2019 Dapil 5.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Daftar Nama Caleg Terpilih Tahun 2019-2024	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2021, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan CEIC, keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 21,89%. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen ini berdampak pada isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan menghambat legislator dalam menangani masalah utama yang dihadapi perempuan. Akibatnya, kuota 30% perempuan di parlemen belum terpenuhi. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih belum berpartisipasi aktif dalam politik pada level 30%, tetapi hal tersebut kemungkinan akan berubah seiring dengan semakin banyaknya perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen dan memiliki suara dalam pembuatan kebijakan.¹

Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28 H ayat 2 dalam dokumen yang sama menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan, dan kedua pasal tersebut menjelaskan jaminan hukum mengenai kesetaraan gender dan kesempatan dalam kegiatan politik.²

Menurut kedua pasal tersebut, hak politik perempuan tidak hanya mencakup kemampuan untuk memilih; hak tersebut juga mencakup hal-hal

¹Putri, Aulia Mutiara Hatia, *Persentase Perempuan di Kursi Parlemen kurang dari 30%*, (CNBC Indonesia).

²Lusiana Margareth Tijow, *Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin*. (Malang: Surya Pena Gemilang, 2017).

berikut: hak untuk bersuara dalam cara kebijakan dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, hak untuk menduduki jabatan publik dan melaksanakan semua tugas yang terkait dengannya, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan hak untuk bergabung dan berpartisipasi dalam lembaga nirlaba yang berfokus pada masyarakat dan politik. Perjanjian yang diratifikasi di tingkat internasional menjamin hak politik perempuan yang sama dengan laki-laki. Hal ini telah memberikan hak politik perempuan bobot hukum yang cukup besar.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, yang mengatur tentang pemilihan umum, merekomendasikan agar partai politik mengajukan kuota yang memuat 30% perempuan. Perwujudan representasi perempuan dapat dimulai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, ada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, yang membahas kebutuhan partai politik untuk memasukkan tiga puluh persen kandidat perempuan untuk posisi legislatif di DCT. Lebih lanjut, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan pemenuhan kuota 30% bagi perempuan dalam kepengurusan sebagai syarat administratif bagi partai politik untuk ikut serta dalam pemilu, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 menjelaskan bahwa pimpinan aparatur pendukung dewan harus mengutamakan keterwakilan perempuan.

Sebanyak 7 perempuan terpilih menjadi anggota DPRK Pidie pada Pemilu Legislatif 2019–2024, hal ini mencerminkan adanya keseimbangan gender (jenis kelamin) di DPRK Kabupaten Pidie. Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan dan impiannya. Salah satu cara untuk terjun ke dunia politik adalah dengan bergabung di partai politik. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah perempuan yang duduk di DPRK terus

meningkat. Hal ini terjadi di Kabupaten Pidie pada siklus pemilu 2019-2024. Sebanyak 7 (tujuh) orang perempuan terpilih menjadi anggota DPRK Kabupaten Pidie dari total 40 kursi yang tersedia dan ada 6 (enam) orang perempuan yang menduduki posisi serupa di DPRK Kabupaten Pidie pada periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang bersedia membiarkan perempuan menjabat di DPRK Kabupaten Pidie. Adapun anggota legislatif DPRK Kabupaten Pidie yang terpilih periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Nama Anggota DPRK Pidie periode 2014-2019 Dapil 1

No	Nama Caleg Terpilih	Nama Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Tgk. H. Ismail Abubakar	Partai Nasdem	605	Laki-laki
2.	Siti Hawa	Partai Keadilan Sejahtera	752	Perempuan
3.	Teuku Saifullah. TS	Partai Golongan Karya	2.335	Laki-laki
4.	Drs. M. Isa Alima	Partai Gerindra	465	Laki-laki
5.	Ir. Muhammad Ali	Partai Demokrat	658	Laki-laki
6.	Jailani H.M Yakob	Partai Aceh	2.384	Laki-laki
7.	Muhammad Jakfar	Partai Aceh	2.165	Laki-laki
8.	Antaruddin	Partai Aceh	1.496	Laki-laki

Tabel 1.2 Daftar Nama Anggota DPRK Pidie Periode 2014-2019 Dapil 2

No	Nama Caleg Terpilih	Nama Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Hj. Cut Metia	Partai Nasdem	399	Perempuan
2.	Khairil Syahrial	Partai Gerindra	4.528	Laki-laki
3.	T. Manyak	Partai Demokrat	735	Laki-laki
4.	Anwar, S. Pd.I.	Partai Aceh	4.307	Laki-laki
5.	Munahasyah, A.Md.	Partai Aceh	2.923	Laki-laki
6.	Anwar Sastra Putra	Partai Aceh	3.816	Laki-laki
7.	Iskandar	Partai Aceh	2.249	Laki-laki
8.	Muzakkir	Partai Aceh	3.559	Laki-laki

Tabel 1.3 Daftar Nama Anggota DPRK Pidie periode 2014-2019 Dapil 3

No.	Nama Caleg Terpilih	Nama Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Nursaadah, S.Ag.	Partai Nasdem	676	Perempuan
2.	Fadli A. Hamid, S.E	Partai Golongan Karya	1.362	Laki-laki
3.	Muhammad Saleh	Partai Gerindra	1.411	Laki-laki
4.	Usman M. Yusuf	Partai Aceh	3.130	Laki-laki
5.	Mahfuddin Ismail, S.Pd.I	Partai Aceh	3.094	Laki-laki
6.	Rosmini, A. Md	Partai Aceh	3.210	Perempuan
7.	Isfandiari	Partai Aceh	3.241	Laki-laki
8.	Muhammad Ali	Partai Aceh	3.271	Laki-laki

Tabel 1.4 Daftar Nama Anggota DPRK Pidie Periode 2014-2019 Dapil 4

No.	Nama Caleg Terpilih	Nama Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Jamaluddin, S.P.	Partai Nasdem	308	Laki-laki
2.	H. Iskandar Siddiq	Partai Demokrat	632	Laki-laki
3.	Muhammad AR	Partai Aceh	4.038	Laki-laki
4.	Tgk. Iskandar Daud	Partai Aceh	2.515	Laki-laki
5.	Samsul Bahri A Wahab	Partai Aceh	5.119	Laki-laki
6.	Cut Aja Yusnidar, S.Pd.I.	Partai Aceh	1.969	Perempuan
7.	Abd. Rahman	Partai Aceh	3.865	Laki-laki
8.	Muhammad	Partai Aceh	4.106	Laki-laki

Tabel 1.5 Daftar Nama Anggota DPRK Pidie Periode 2014-2019 Dapil 5

No	Nama Caleg Terpilih	Nama Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Tgk, H. Muhammad Ali, S.Ag	Partai Nasdem	1.633	Laki-laki
2.	Syarifuddin	Partai Golongan Karya	2.121	Laki-laki
3.	Ramzi	Partai Gerindra	927	Laki-laki
4.	Tgk. Fakhurrazi, S.HI.	Partai Damai Aceh	899	Laki-laki
5.	Zainal Alsi	Partai Aceh	2.172	Laki-laki
6.	Elidawati	Partai Aceh	2.247	Perempuan
7.	Abdullah	Partai Aceh	2.346	Laki-laki
8.	Husaini	Partai Aceh	2.342	Laki-laki

Berdasarkan Tabel di atas, maka perempuan harus memiliki suara dalam politik agar generasi perempuan di masa depan dapat diberdayakan dan hak-hak mereka dapat dilindungi. Sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi

berkuasa dalam pemerintahan negara kita. Proses demokrasi yang berhasil memerlukan representasi dari kedua jenis kelamin dalam politik, karena perempuan dan laki-laki merupakan dua kelompok politik utama. Dalam merumuskan kebijakan, elit politik perempuan berbeda dari rekan-rekan laki-laki mereka dalam perspektif dan sikap.

Mengenai representasi keterwakilan perempuan dapat mempengaruhi rasa percaya politik, namun ada kemungkinan bahwa tidak semua kelompok dalam masyarakat akan memberikan respons yang sama terhadap peningkatan jumlah perempuan yang terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Karena peningkatan keterwakilan perempuan mengorbankan keterwakilan laki-laki, laki-laki mungkin bereaksi berbeda dibandingkan perempuan. Meskipun perempuan mungkin merasa lebih berdaya dan lebih tanggap terhadap kebijakan, laki-laki mungkin memiliki intuisi sebaliknya, karena mereka merasa kehilangan pengaruh politik.³ Oleh karena itu, kita harus memperhitungkan fakta bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam cara mereka dipengaruhi oleh penggambaran perempuan.

Meskipun penggambaran deskriptif perempuan berkontribusi untuk memahami sikap politik, sejauh mana hal itu dilakukan bergantung pada sejauh mana individu memiliki kesadaran politik. Koefisien persentase keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa responden dengan tingkat kesadaran politik sedang dan rendah yang menghadapi dewan legislatif kota dengan tingkat keterwakilan deskriptif perempuan yang lebih tinggi cenderung tidak

³ Stacy G. Ulbig, *Gendering Municipal Government: Female Descriptive Representation and Feelings of Political Trust*, *Journal Social Science Quarterly*, Volume 88, Number 5, December 2007, (Sam Houston State University, 2007).

menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah kota mereka. Pada saat yang sama, responden dengan tingkat kesadaran politik yang tinggi tampaknya tidak terpengaruh oleh tingkat keterwakilan perempuan. Seperti yang diharapkan, dampak gender yang berbeda dari representasi deskriptif hanya muncul di antara sebagian sampel, yaitu 50 persen dari mereka yang diwawancarai, yang melaporkan memiliki kesadaran politik yang moderat. Di antara kelompok ini, jumlah perempuan dan meningkatnya keterwakilan perempuan berhubungan negatif dengan rasa kepercayaan politik. Namun, perempuan dengan tingkat kesadaran politik sedang menghadapi pemilu lebih representatif secara deskriptif memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan kepercayaan politik.⁴

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh faktor dukungan dari masyarakat yang rendah. Masyarakat masih cenderung memilih caleg laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan masih adanya keraguan dari masyarakat terhadap kemampuan perempuan menjalankan fungsi dan perannya di panggung politik. Masyarakat yang menganggap bahwa politik itu merupakan ranah laki-laki.⁵ Meningkatkan jumlah perempuan yang menjabat sebagai anggota DPRK hanyalah salah satu aspek keterlibatan perempuan dalam politik. Selain itu, kita perlu mengetahui bagaimana anggota parlemen perempuan dapat lebih baik mengadvokasi hak-hak perempuan dengan membentuk kebijakan publik.

⁴Stacy G.Ulbig, *Gendering Municipal Government: Female Descriptive Representation and Feelings of Political Trust*, *Journal Social Science Quarterly*, Volume 88, Number 5, December 2007, (Sam Houston State University, 2007).

⁵Jurnal IDEA, “*Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*”, (Jakarta: Internasional IDEA, 2002).

Warga Kabupaten Pidie menunjukkan ciri-ciri saat memilih calon, selain dari masalah yang telah disebutkan. Peneliti di lapangan menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Pidie memiliki ciri-ciri fisik tertentu. Sebelum calon dapat mencalonkan diri, masyarakat Kabupaten Pidie mempelajari informasi penting tentang mereka, seperti kepribadian, kehadiran di media sosial, dan kapasitas untuk menangani masalah masyarakat. Anggota daerah pemilihan Kabupaten Pidie mencari pemimpin yang mudah didekati dan bersosialisasi. Karena membentuk tim kampanye sangat berguna untuk mendekati keluarga dan perempuan agar menjadi anggota masyarakat yang dapat dipercaya dalam menjalankan semua kegiatan, beberapa bahkan bersedia menjadi anggota tim kampanye calon.⁶ Meski demikian, masyarakat Kabupaten Pidie tidak memiliki keyakinan pada kemampuan perempuan untuk langsung mencalonkan diri. Pekerjaan rumah tangga adalah ranah eksklusif perempuan, menurut mereka. Mereka tidak percaya perempuan dapat menjadi calon legislatif karena berbagai alasan, termasuk kurangnya keakraban dengan calon dan skeptisisme tentang kualifikasinya.

Ada banyak hubungan antara kepercayaan politik dan topik lainnya, sehingga penting untuk mengatasinya. Perilaku publik, kebahagiaan warga negara terhadap pemerintah, stabilitas demokrasi, kepatuhan hukum, dukungan terhadap kebijakan pemerintah, dan sejauh mana masyarakat dengan sengaja mengikuti arahan pemimpin politik merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada banyak masalah yang dapat muncul dari kurangnya kepercayaan publik pada anggota DPRK khususnya Kabupaten Pidie, seperti berikut ini penurunan efisiensi

⁶ Hasil Observasi dengan Faisal, Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2023 Pada Tanggal 3 September 2023.

anggota DPRK dalam memenuhi tugasnya, terhentinya pembangunan daerah; kegagalan program anggota legislatif, dan kurangnya minat dan partisipasi dalam lembaga dan kegiatan politik. Protes yang ditujukan kepada pemerintah juga dapat terjadi ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah. Kami berharap hal ini akan memaksa anggota DPRK untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi masalah lokal. Keterlibatan publik dalam proses pemilu berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga politik. Tingkat kepercayaan politik yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat keterlibatan politik yang lebih tinggi dalam pemilu.⁷

Permasalahan lainnya adalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan perempuan, dan sulitnya merekrut perempuan yang memiliki pengetahuan untuk bersaing dengan laki-laki. Perempuan yang cakap secara politik sering kali mendapati diri mereka dalam peran yang non-partisan. Faktor penghambat lainnya adalah faktor keluarga, seperti masalah izin dari pasangannya. Banyak suami yang cenderung menolak pandangan dan kegiatan tambahan mereka di luar rumah. Kegiatan politik biasanya menuntut tingkat keterlibatan yang tinggi.

Satu fenomena menarik terkait dengan peningkatan representasi perempuan di DPRK Pidie menonjol dari tren umum penurunan representasi perempuan di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi **“Kepercayaan Masyarakat Dan Peningkatan Representasi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Kabupaten Pidie Periode 2019-2024”**.

⁷Lusy Asa Akhrani, Fitsabilla Imansari, dan faizah, *Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemula, Jurnal MEDIAPSI*, Vol. 4 No 1 (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah permasalahan penelitian berdasarkan uraian latar belakang:

1. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif perempuan di DPRK Kabupaten Pidie Periode 2019-2024?
2. Bagaimana strategi anggota legislatif perempuan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini didasarkan pada pernyataan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif perempuan di DPRK Kabupaten Pidie Periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi anggota legislatif perempuan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat penelitian ini menurut tujuan penelitian sebelumnya:

1. Manfaat Teoritis, yaitu

Peneliti di masa mendatang yang ingin memperluas karya ini akan menganggap penelitian ini berharga. Ilmu politik telah diuntungkan dari statistik penelitian ini tentang sumbangan pemilu, yang telah memperkuat pemahaman kita tentang hubungan antara kepercayaan publik dan munculnya perempuan dalam posisi legislatif di Kabupaten Pidie.

2. Manfaat Praktis, yaitu

Dengan dilakukan penelitian ini, maka politikus perempuan di lembaga legislatif Pidie mengetahui informasi sejauh mana kepercayaan masyarakat dan peningkatan representasi keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Pidie selama ini dan untuk bahan masukan kepada anggota legislatif perempuan di Pidie terkait yang menjadi pengaruh dari peningkatan representasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pidie, sehingga dalam menjalankan fungsinya dapat berjalan dengan baik.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulis akan terlebih dahulu menguraikan sistematika pembahasan untuk membantu pembaca memahami konsep ini dengan lebih baik. Ada lima bab yang saling terkait yang menyusun skripsi ini.

Bab I Informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika pembahasan semuanya merupakan bagian dari Bab I.

Bab II dikhususkan untuk meninjau literatur, yang mencakup topik-topik seperti kepercayaan politik dan metode untuk memengaruhinya, serta penelitian dan landasan teori yang berlaku.

Pada Bab III, akan menemukan metodologi penelitian, yang meliputi: pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan prosedur pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan pembahasan penelitian tentang Pidie (deskripsi sosial budaya dan relasi gender), kepercayaan publik terhadap anggota legislatif perempuan di Kabupaten Pidie DPRK dari tahun 2019 hingga 2024, dan strategi

yang digunakan anggota legislatif perempuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik.

Bab V merupakan bab terakhir. Sebagai hasil dari analisis pertanyaan penelitian yang diajukan selama perumusan masalah, penulis memperoleh beberapa simpulan dalam bab terakhir ini. Dalam bab ini, juga membahas isu-isu yang diangkat dalam pembahasan dan memberikan berbagai saran kepada pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis telah diidentifikasi dari literatur yang ada:

Penelitian yang dilakukan oleh Abd Rohim (2013) yang berjudul “Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterwakilan perempuan di lembaga DPRD kota Yogyakarta yang belum sejalan dengan demokrasi. Undang-undang yang selama ini dibuat memperdayakan perempuan, demi mendapatkan hak-haknya belum menghasilkan perubahan. Faktor yang berpengaruh terhadap kepemimpinan perempuan adalah, kurangnya peran aktif perempuan dalam kebijakan publik sebagai anggota DPRD untuk memperoleh haknya sesuai amanat Undang-undang 1945.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Nusya Julita (2020) yang berjudul “Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor keterhambatan rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tejo, adapun hasil dari penelitian ini ialah menjelaskan bahwa banyaknya faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan, pengaruh dari mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuat keputusan atau kebijakan.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Puspa Andini (2021) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kecamatan Parenggean”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di lingkungan I Kelurahan Parenggean, Hasil dari penelitian ini ialah masyarakat masih ragu-ragu terhadap kemampuan dari caleg perempuan untuk menjadi wakil rakyat di DPRD nantinya, ditambah masih kuatnya budaya patriarki yang masih mendominasi di mana peran kepemimpinan politik hanya ranah laki-laki.

Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Adinda Amalia Adrianty (2019) yang berjudul “Perempuan Dan Parlemen Studi Tentang Meningkatnya Perolehan Kursi DPR RI Perempuan Partai Golkar Pada Pemilu 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partai Golkar dapat menaikkan perolehan kursi perempuan dalam Pemilu 2019, adapun hasil dari penelitian ialah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, pemberian kuota perempuan ditunjang dengan *zipper system* dan aturan nomor urut. Partai politik diharuskan sedikitnya menempatkan satu caleg perempuan di antara tiga caleg yang dicalonkan pada nomor urut. Komitmen partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dapat dilihat dari pemberian nomor urut kepada caleg perempuannya. Pemberian nomor urut yang strategis dapat meningkatkan peluang perempuan bisa maju menjadi anggota legislatif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian>Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009 (Abd Rohim, 2013)	Dalam penelitian ini sama-sama membahas Keterwakilan Perempuan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, variabel yang teliti adalah problematika keterwakilan perempuan, faktor Faktor yang berpengaruh terhadap kepemimpinan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009
2	Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024". (Eka Nusya Julita, 2020)	Dalam penelitian ini sama-sama membahas keterwakilan politik perempuan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, variabel yang teliti adalah faktor keterhambatan rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tejo
3	Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kecamatan Parenggean. (Puspa Andini, 2021)	Dalam penelitian ini sama-sama membahas keterwakilan perempuan dalam legislatif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, variabel yang teliti adalah persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di lingkungan I Kelurahan Parenggean
4	Perempuan Dan Parlemen Studi Tentang Meningkatnya Perolehan Kursi DPR RI Perempuan Partai Golkar Pada Pemilu 2019. (Adinda Amalia Adrianty, 2019)	Dalam penelitian ini sama-sama membahas keterwakilan perempuan dalam legislatif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, variabel yang teliti adalah Partai Golkar dapat menaikkan perolehan kursi perempuan dalam Pemilu 2019

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kepercayaan Politik (*Political Trust*)

Pentingnya kepercayaan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilebih-lebihkan. Keterlibatan publik dalam pemilu berkorelasi dengan tingkat kepercayaan pada lembaga politik. Ketika warga negara memiliki kepercayaan pada pemerintah dan para pemimpinnya, mereka cenderung mendukungnya dan

sistem demokrasi secara keseluruhan. Tingkat kepercayaan politik yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat keterlibatan politik yang lebih tinggi dalam pemilu. Demikian pula, keterlibatan masyarakat dalam politik menurun seiring dengan menurunnya kepercayaan pada pemerintah.⁸

Political trust dipahami sebagai dukungan warga negara terhadap lembaga-lembaga politik seperti pemerintah dan parlemen dalam menghadapi ketidakpastian atau kerentanan terhadap tindakan mereka. Ini dianggap penting untuk pemerintahan demokratis, karena memengaruhi kualitas demokrasi perwakilan. Meskipun kepercayaan politik sering dianggap sebagai nilai prodemokrasi, keberadaannya tidak selalu merugikan demokrasi karena dapat mendorong keterlibatan politik melalui skeptisisme, yang memacu warga negara untuk menilai lembaga-lembaga politik berdasarkan kemampuan mereka sendiri.⁹

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terdiri dari hal-hal sebagai berikut: Pertama, bagaimana masyarakat mempersepsikan pemerintah kinerja memburuk, kepercayaan akan menurun. Hubungan statistik seharusnya positif karena kinerja yang lebih baik akan menunjukkan peningkatan kepercayaan, dan kepercayaan akan sering terjadi berfluktuasi seiring perubahan kinerja. Kedua, penurunan modal sosial juga dapat mengikis kepercayaan dan mempengaruhi pergerakan kepercayaan jangka panjang tanpa mempengaruhi kepercayaan secara bersamaan.¹⁰

⁸ Lusy Asa Akhrani, Fitsabilla Imansari, dan Faizah, Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula, *Jurnal MEDIAPSI*, 4(1),1-6, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).

⁹ Van der Meer, T.W, Political trust and the “*crisis of democracy*”. In Oxford research encyclopedia of politics, 2017), hlm 1.

¹⁰ Cristina Arballo, *A Woman's Place is in Governance: Public Trust and The Rise of Female Leadership*, Thesis, (Northridge: Universitas Negeri California, 2018).

Kepercayaan politik telah lama dipandang sebagai kunci keberhasilan demokrasi. Sinisme terhadap pemerintahan dan proses politik dianggap dapat mengurangi partisipasi dan kualitas demokrasi dan pihak lain yang berpendapat bahwa ketidakpercayaan dapat mengikis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah, yang mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hukum. Secara empiris, preferensi kebijakan, evaluasi terhadap presiden petahana dan Kongres, dukungan terhadap program pemerintah, kepercayaan terhadap pemerintahan di tingkat daerah, dan dukungan terhadap batasan masa jabatan telah dikaitkan dengan kepercayaan terhadap pemerintah federal, secara perilaku, pilihan suara dan kemungkinan kepatuhan pajak telah dikaitkan dengan kepercayaan politik.¹¹

Ketika kepercayaan dievaluasi menggunakan cara politik, itu disebut kepercayaan politik. Bila warga negara memiliki kepercayaan pada pemerintah dan lembaganya, mereka akan memiliki kepercayaan pada proses pembuatan kebijakan secara keseluruhan, dan mereka akan memiliki kepercayaan pada kejujuran, efisiensi, keadilan, dan integritas pejabat terpilih mereka. Masyarakat akan memiliki banyak kepercayaan pada pemerintah bila mereka menganggap lembaga, pemimpin, dan kebijakannya sangat baik. Umumnya dipercaya bahwa bila masyarakat mempercayai hidup mereka pada pemerintah dan pejabat publik, mereka akan selalu mengutamakan kepentingan terbaik mereka.¹²

Political trust didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi politik hal ini mencakup sikap atau tindakan

¹¹ Stacy G.Ulbig, *Gendering Municipal Government: Female Descriptive Representation and Feelings of Political Trust*, *Journal Social Science Quarterly*, Volume 88, Number 5, December 2007, (Sam Houston State University, 2007).

¹² Rajif Al Fatakh, Pengaruh Kepercayaan Partai Politik Terhadap Keputusan Memilih Pada Masyarakat Di Kota Malang, *Skripsi Psikologi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 hlm 15-16).

yang dinyatakan oleh individu atau kelompok dalam konteks politik, melibatkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan penerapan standar masyarakat atau nilai-nilai yang diharapkan dalam pengaturan administratif. Proses membangun kepercayaan mencakup kepercayaan politik. Seperti interaksi manusia lainnya, kepercayaan politik melibatkan kepercayaan. Kapasitas, akuntabilitas, keterampilan, dorongan, keadilan, dan modal sosial merupakan komponen penting dari proses ini. Kepercayaan politik dibangun atas interaksi horizontal antara warga negara dan pemerintahnya serta hubungan vertikal antara warga negara dan lembaga politiknya. Aturan, prosedur, dan sistem menjadi dasar dari hal ini.¹³

McLean dalam Maulidia, dkk Memiliki keyakinan pada semua bagian politik, termasuk administrasi, tindakan tertentu, atau kebijakan yang ditetapkan oleh tokoh politik. Loeber dalam Maulidia, dkk Kepercayaan politik didefinisikan sebagai sikap, harapan, dan keyakinan yang dimiliki individu terhadap lembaga politik, sistem demokrasi, dan politisi.¹⁴

Surbakti berpendapat orang akan menjadi pesimis tentang keyakinan politik mereka jika tidak sesuai dengan harapan mereka. Pendapat individu tentang pemerintah mereka adalah inti dari kepercayaan politik.¹⁵ Sebagai konsekuensinya, Matulesy berpendapat bahwa lembaga politik suatu negara merupakan sistem politiknya, dan bahwa kepercayaan politik adalah keyakinan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Orientasi untuk mengevaluasi komponen-

¹³ Dwiyanto Agus, *Manajemen Pelayanan Public*, (Yogyakarta: Gadjadarda University Press, 2011), hlm 355.

¹⁴ Ananda Saadatul Maulidia, Andik Matulesy, RR. Amanda Pasca Rini, *Kepercayaan Politik dan Intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Keyakinan Teori Konspirasi COVID-19. Jurnal Psikologi*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2021).

¹⁵ Meihesty Pasadak, *Hubungan Antara Kepercayaan Politik Dengan Partisipasi Politik Pada Mahasiswa Ilmu Hukum Tata Negara Uin Suska Riau. Skripsi*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm 17.

komponen sistem politik berdasarkan ekspektasi normatif dikenal sebagai kepercayaan politik. Konsisten dengan pendapat Wahyudi, ditetapkan bahwa orang-orang yang memiliki kepercayaan politik lebih mungkin terlibat dalam setiap keputusan dan kebijakan politik.¹⁶

Kepercayaan politik, menurut definisi di atas, adalah keyakinan seseorang terhadap pemerintahnya yang berasal dari evaluasi mereka terhadap kinerja pemerintah.

1. Aspek-aspek Kepercayaan Politik

Sederhananya, kepercayaan politik adalah keyakinan yang dimiliki warga negara terhadap pemerintah dan perwakilannya untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sukses. Ada tiga bagian dari kepercayaan politik, menurut Lewicki:

- a. Kapasitas untuk menginspirasi kepercayaan pada rekan-rekannya melalui penguasaan materi pelajaran yang relevan dan demonstrasi kinerja tingkat ahli yang konsisten.
- b. Kejujuran, atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai seseorang dalam mempercayai orang lain sebagaimana seseorang memandang mereka berdasarkan karakteristik, situasi, dan potensi mereka.
- c. Kebajikan, atau tingkat keyakinan seseorang bahwa orang lain akan memperlakukan mereka dengan baik.¹⁷

¹⁶ Randy Pranata Putra, Tengku Rika Valentina, Indah Adi Putri, Peran Kepercayaan Politik, Efikasi Politik, Dan Orientasi Kandidat Terhadap Partisipasi Politik. *Jurnal MEDIAPSI*, Vol. 7, No. 2, 166–178. (Padang: Universitas Andalas, 2021), hlm 167.

¹⁷Wibowo, M Ganda Abdi, Hubungan Antara Persepsi Terhadap Korupsi Massal DPRD dengan Kepercayaan Politik (*Political Trust*). *Undergraduate Thesis*, (Untag 1945 Surabaya, 2019), hlm 8.

Kasperson menguraikan pendapat sebelumnya dengan mengatakan bahwa ada empat bagian dalam konsep kepercayaan politik:

- a. Kompeten berarti bahwa masyarakat umum percaya bahwa objek yang dipercaya benar-benar dapat melakukan apa yang dikatakannya.
- b. Pandangan yang berkomitmen secara intrinsik menyatakan bahwa suatu objek sepenuhnya dikhususkan untuk melayani kepentingan publik.
- c. Tekanan atau dukungan publik membentuk dasar dari visi objek yang berkomitmen secara ekstrinsik.
- d. Keandalan, atau kapasitas objek dan tingkat perilaku yang konsisten, merupakan aspek prediktabilitasnya.¹⁸

Dari apa yang telah kita pelajari sejauh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan politik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti seberapa kompeten, murah hati, dan dapat dipercayanya seseorang, serta seberapa dapat diprediksi tindakan mereka.

2.2.2 Strategi Yang Dilakukan Mempengaruhi Kepercayaan Politik

Arti asli dari kata "strategi" adalah *the art of the general* atau "seni komandan," yang keduanya merupakan istilah yang terkait erat dalam bahasa Yunani. Definisi umum strategi adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan

¹⁸ Wibowo, M Ganda Abdi, Hubungan Antara Persepsi Terhadap Korupsi Massal DPRD dengan Kepercayaan Politik (*Political Trust*). *Undergraduate Thesis*. (Untag 1945 Surabaya, 2019), hlm 9.

seseorang. Strategi adalah rencana tindakan yang menggabungkan seni dan sains untuk membangun kekuatan yang ada guna mencapai tujuan masa depan.¹⁹

Singkatnya, strategi adalah tindakan memutuskan atau bekerja menuju rencana menyeluruh yang berpusat pada tujuan jangka panjang organisasi, terkadang bersamaan dengan perencanaan tindakan atau pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Ansoff, masa depan perusahaan dapat dipahami dengan melihat strateginya, yang merupakan faktor pemersatu yang menghubungkan perusahaan dengan pasar produk. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa strategi adalah fondasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan pedoman dasar yang ditetapkan.²⁰ Strategi perusahaan adalah rencana menyeluruh untuk memenuhi tujuan utamanya dalam menghadapi peluang dan ancaman eksternal. Strategi adalah dokumen terpadu, holistik, dan kohesif yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan faktor-faktor ini. Strategi dapat didefinisikan sebagai kumpulan tujuan dan serangkaian cara untuk mencapainya.²¹

Bagaimana para pemimpin perempuan, ketika memegang jabatan publik, dapat memperoleh dan menjaga kepercayaan rakyat? Menurut Chin ketika orang memercayai seorang pemimpin, mereka cenderung mendukung upaya mereka untuk mewujudkan visi mereka. Ketika orang-orang memiliki kepercayaan pada pemerintah, mereka cenderung bekerja sama untuk kebaikan bersama. Menurut Martinelli kepercayaan para pemimpin perempuan terhadap lembaga publik telah

¹⁹ Ardiansyah, Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Maros, *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm 8.

²⁰ H. Abd. Rahman, dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, (Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah: Makassar, 2017), hlm 4.

²¹ Amirullah, *Pengantar Manajemen*, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2015), hlm 5.

meningkat perubahan paradigma dalam tipe pemimpin yang dipekerjakan oleh badan-badan publik. Masyarakat yang semakin meningkat kepercayaan terhadap pemimpin perempuan telah menyebabkan perubahan besar dalam sikap masyarakat di seluruh dunia.²²

Seorang peserta pemilu perlu memiliki rencana politik jika ingin memenangkan pemilu. Para peserta melaksanakan strategi tersebut dengan menunjukkan kepada para pemilih bahwa mereka layak dipilih. Karena taktik ini digunakan secara tidak langsung untuk memenangkan pertarungan politik, sangat penting bagi para kandidat untuk dapat menilai kemampuan mereka sendiri dalam kaitannya dengan lawan-lawan mereka.²³

Ideologi partai politik dan tatanan sosial yang mapan harus menginformasikan strategi yang dikembangkan oleh partai politik saat merencanakan platform politiknya. Masalahnya adalah bahwa partai politik akan kesulitan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pendekatan ini. Partai politik pasti akan menghadapi sejumlah keadaan yang dapat memengaruhi strategi mereka saat mereka menjalankan strategi politik mereka.

Banyak elemen, termasuk pendidikan seseorang, lingkaran sosial, latar belakang pendidikan, paparan media, dan lingkungan budaya dan ideologis seseorang, membentuk pandangan politik seseorang. Ada berbagai macam opini politik yang dianut oleh orang, kelompok, dan negara yang berbeda. Pandangan politik, kebiasaan memilih, dan tingkat keterlibatan politik seseorang semuanya dipengaruhi secara signifikan oleh nilai-nilai inti mereka. Strategi partai politik

²² Cristina Arballo, *A Woman's Place is in Governance: Public Trust and The Rise of Female Leadership, Thesis*, (Northridge: Universitas Negeri California, 2018).

²³ Firmanzah, *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas Edisi Revisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm 109.

dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut. Syed mengutip tesis Dalton yang menyatakan bahwa ada lima komponen kepercayaan politik:²⁴

1. Kemampuan politisi dan pemerintah untuk memenuhi tugas mereka secara kompeten merupakan dasar kepercayaan publik kepada mereka.
2. Kebaikan hati seseorang terwujud ketika mereka memiliki kepercayaan pada pemerintah mereka, percaya bahwa pemerintah memperhatikan kepentingan terbaik mereka, dan memahami masalah-masalah sosial yang muncul.
3. Kejujuran, keterbukaan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap prinsip dan cita-cita merupakan ciri-ciri pemerintah dan politisi terpilih yang jujur dan dapat dipercaya.
4. Keandalan mengacu pada kepercayaan yang dimiliki individu terhadap pemerintah dan politisi mereka untuk memenuhi komitmen mereka dan bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Kepercayaan seseorang kepada pemerintah dan wakilnya untuk menegakkan hukum tanpa memihak satu kelompok terhadap kelompok lain merupakan contoh keadilan.

Tranter dan Skrbis menyatakan bahwa kepercayaan dapat dibentuk melalui dua cara:

1. Faktor rasional yang strategis dan penuh perhitungan menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya karena keahlian atau posisi mereka di bidang tersebut. Orang yang memberikan kepercayaan (pemberi kepercayaan) memiliki gambaran tentang kapasitas penerima delegasi untuk memenuhi

²⁴ Meihesty Pasadak, Hubungan Antara Kepercayaan Politik Dengan Partisipasi Politik Pada Mahasiswa Ilmu Hukum Tata Negara Uin Suska Riau. *Skripsi*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm 18.

harapan yang diberikan kepada mereka. Perspektif ini berpendapat bahwa kepercayaan biasanya didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal dan bahwa mengenal seseorang dengan baik diperlukan untuk membangun kepercayaan dengan mereka.

2. Kepercayaan yang berlandaskan pada etika yang baik dan kebaikan individu dikenal sebagai faktor relasional, faktor afektif, atau faktor moral. Kepentingan bersama, emosi yang sama, dan nilai-nilai yang disepakati bersama merupakan fondasi kepercayaan dalam hubungan. Agar tidak ada satu individu pun yang terpengaruh oleh perubahan, masyarakat mempertimbangkan semua faktor sebelum memberikan kepercayaan.²⁵

Kepercayaan politik terhadap lembaga politik dapat diukur dengan menggunakan metrik sebagai berikut:

1. *Competence* (kinerja), sesuatu yang menunjukkan *strong performance* yang berkaitan dengan kemampuan dan kinerja pihak partai politik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
2. *Care* (keperdulian), mencakup kapasitas dan keinginan partai untuk memperlakukan semua warga negara secara setara dan adil, terlepas dari latar belakang komunal mereka, dan untuk memenuhi hak-hak minoritas.
3. *Accountability* (akuntabilitas atau komitmen), kemampuan dan kewajiban partai politik untuk bertanggung jawab serta komitmen atas tindakan dan keputusannya kepada masyarakat.
4. *Reliability* (keandalan), adalah sejauh mana masyarakat dapat mengandalkan dan percaya bahwa hasil kebijakan partai politik akan

²⁵Tranter, B & Skrbis, Z. *Trust and Confidence: A Study of Young Queenslanders*. Australian Journal of Political Science, (2009), hlm 2

sesuai dengan janji, serta seberapa cepat sebuah partai dapat merespon permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.²⁶

Dari apa yang telah kita pelajari sejauh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan politik terhadap lembaga politik dapat diukur dengan kinerja, keperdulian, akuntabilitas atau komitmen dan keandalan.



²⁶ Van der Meer, T.W, Politicaltrust and the “*crisis of democracy*”. In. Oxford. research encyclopedia of politics, 2017), hlm 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kepercayaan publik dan peningkatan jumlah perempuan yang mewakili Kabupaten Pidie di lembaga legislatif dari tahun 2019 hingga 2024, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Secara teori, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian di mana peneliti berpartisipasi secara aktif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan kebutuhan tertentu.²⁷ Pendekatan ini bergantung pada strategi pemecahan masalah yang menggambarkan status terkini topik atau subjek penelitian menggunakan fakta yang tersedia.

Alasan dilakukannya penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Djam'an Satori, antara lain keinginan untuk mendalami fenomena deskriptif yang tidak berwujud dan tidak dapat dianalisis secara kuantitatif. Fenomena tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan suatu tugas, bahan-bahan yang digunakan dalam suatu resep, kualitas suatu produk atau layanan, praktik budaya, representasi fisik suatu artefak, dan sebagainya.²⁸ Karena data kualitatif lebih mudah dikumpulkan, itulah sebabnya peneliti memilih untuk menggunakannya. Data yang masuk akal

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2018), hlm 2.

²⁸ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2017), hlm 23.

dan fakta-fakta nyata dari lapangan adalah hal-hal yang dicari peneliti dalam penelitian mereka.

3.2 Fokus Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini ingin mengupas ide penelitian ini secara mendalam agar dapat memperoleh jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengetahui bagaimana kepercayaan publik dan peningkatan representasi keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Pidie periode 2019–2024 berjalan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi penelitian atau tempat peneliti bekerja di lapangan. Penentuan lokasi penelitian sangat penting untuk menjaga kontrol terhadap data yang dikumpulkan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Pidie.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Hal yang diteliti disebut sebagai "sumber" data penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan sumber informasi primer dan sekunder:

1. Data Primer. Sumber primer adalah sumber yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara yang lebih langsung. Penulis mengandalkan data primer, yang mencakup informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner yang diberikan oleh sumber asli, untuk memperkuat kredibilitas temuan penelitian. Data primer dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemikiran dan perasaan individu atau kelompok, serta laporan langsung tentang peristiwa atau kegiatan.

2. Data Sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang mengandalkan pihak lain, seperti orang lain atau dokumen, daripada pengumpul data itu sendiri untuk menyediakan data. Untuk memperkuat kredibilitas penelitian, penulis juga mengumpulkan data sekunder. Pembahasan tesis ini bergantung pada data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan, termasuk buku, jurnal, dan literatur relevan lainnya. Sumber data yang mencakup berbagai macam media tekstual dan visual.

3.5 Informan Penelitian

Area generalisasi memiliki sejumlah besar orang dan ciri-ciri tertentu, beberapa di antaranya termasuk informan.²⁹ Orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang fenomena yang diteliti, baik sebagai pemain atau orang luar, disebut informan penelitian. Karena penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini tidak bergantung pada sampel acak, melainkan pada wawancara dengan informan utama. Jika kita ingin mengetahui akar permasalahan dari kesulitan penelitian yang ada, kita memerlukan hal ini.

Mencari banyak informan penelitian dengan sumber yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti sangat penting untuk mengoptimalkan penelitian legislatif Kabupaten Pidie 2019–2024 tentang kepercayaan publik dan peningkatan keterwakilan perempuan. Anggota DPRK Kabupaten Pidie yang berjenis kelamin perempuan dilibatkan. Partisipan penelitian ini meliputi legislator perempuan, caleg perempuan, pimpinan partai politik yang maju dalam pemilu 2004, pejabat KPUD, kepala kantor PKB/Linmas, dan anggota masyarakat

²⁹ *Ibid*, hlm 117.

umum. Adapaun informan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Tabel dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	Teuku Saifullah, TS	DPRK Kabupaten Pidie
2	Erlinawaty	DPRK Kabupaten Pidie
3	Ida Susanti	DPRK Kabupaten Pidie
4	Kharniadi	Camat Delima Kabupaten Pidie
5	Faisal	Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie
6	Raudah	Masyarakat Umum
7	Fitriani	Masyarakat Umum
8	Raudatul Aini	Masyarakat Umum
9	Siti	Masyarakat Umum

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyusun data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik berikut: observasi, wawancara, dan dokumentasi yang cermat:

1. Observasi. Observasi adalah pengumpulan data tertentu di mana peneliti mengamati secara fisik suatu objek atau fenomena yang menarik untuk mencatat setiap detail yang relevan dan menarik kesimpulan tentang gejala sebenarnya dari objek tersebut.³⁰ Keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Pidie periode 2019–2024 menjadi subjek observasi langsung yang dilakukan dengan menggunakan kriteria observasi.
2. Wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk mengenal orang lebih dalam ketika tidak banyak orang yang disurvei atau ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi isu-isu yang perlu diteliti lebih lanjut.³¹ Wawancara langsung dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan terperinci yang dapat digunakan

³⁰ Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar, Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. (Surakarta: UNS Press, 2016), hlm 185.

³¹Ibid, hlm 137.

sebagai pembuka diskusi berdasarkan temuan penelitian, selain tatap muka wawancara dilakukan melalui whatshap.

3. Dokumentasi. Data dan informasi dapat ditemukan dalam buku, arsip, makalah, tulisan, foto, dan angka dalam laporan dan pernyataan melalui dokumentasi.³² Peneliti harus mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, baik dari literatur yang ada (misalnya, buku, jurnal, surat kabar, peraturan pemerintah, dan karya tulis) maupun dari hasil penelitiannya sendiri selama penelitian berlangsung, untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Tujuan penggunaan teknik analisis adalah untuk mengetahui rumusan dan hasil penelitian. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh melalui dokumen yang terorganisasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif sebagai teknik analisis datanya. Menurut Miles dan Hiberman dalam Sutopo, analisis data terutama melibatkan tiga langkah berikut:³³

1. Reduksi data (*data reduction*). Catatan yang diambil selama wawancara, dokumen, dan refleksi peneliti semuanya merupakan bagian dari catatan lapangan, dan reduksi data adalah proses pemilihan informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut. Reduksi data dapat dilihat sebagai pemilihan aspek yang paling penting atau meringkasnya. Menjaga poin-poin utama

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2018), hlm 139.

³³ Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar, Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. (Surakarta: UNS Press, 2016), hlm 91.

dalam pikiran saat mencari pola dan tema. Dengan demikian, peneliti akan lebih mudah mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika diperlukan berkat berkurangnya data, yang juga akan memberikan gambaran yang lebih jelas.³⁴ Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di legislatif Kabupaten Pidie selama periode 2019–2024 sekaligus membata

2. Penyajian data merupakan kompilasi fakta-fakta yang terorganisasi dengan deskripsi naratif yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, termasuk naratif, visual (seperti grafik atau skema), dan tabular (untuk mendukung narasi). Dimungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan serangkaian fakta yang terorganisasi. Apa yang terjadi dapat diamati, dan analisis serta tindakan dapat diambil, berkat penyajian data.
3. Pada tahap ketiga dan terakhir, yang dikenal sebagai penarikan kesimpulan, kesimpulan ditarik dan diverifikasi menggunakan serangkaian data lapangan yang telah disusun dan disajikan. Sampai prosedur pengumpulan data selesai, penelitian akan tetap terbuka terhadap data yang diperoleh. Jika, setelah kesimpulan, tidak ada data yang cukup, peneliti akan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data.

3.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Keabsahan data adalah metode untuk memastikan bahwa data akurat dan dapat dipercaya. Ketika semua data yang digunakan dalam penelitian akurat dan

³⁴ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 247.

asli, dan peneliti tidak mengubah atau memanipulasi angka apa pun, kita mengatakan bahwa data tersebut autentik.³⁵ Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi memerlukan pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda dan pada periode yang berbeda.³⁶ Namun, keandalan data dalam penelitian kualitatif bersifat jamak, bukan tunggal, dan bergantung pada konstruksi manusia dengan sejarah yang berbeda-beda. Peneliti mengandalkan komponen triangulasi untuk memverifikasi keakuratan dan kredibilitas data.



³⁵ Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar, Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. (Surakarta: UNS Press, 2016), hlm 98.

³⁶ *Ibid*, hlm 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pidie: Gambaran Sosial Budaya dan Relasi Gender

Melihat budaya melalui kacamata bahasa akan mengungkap ide, alasan, praktik, karakteristik masyarakat maju, dan kebiasaan yang sulit dihilangkan. Praktik sosial lain yang diwariskan turun-temurun adalah budaya.³⁷ Dalam konteks ini, peneliti mengacu pada praktik busana di kalangan masyarakat Kabupaten Pidie.

Penduduk Aceh di Kabupaten Pidie, secara keseluruhan memiliki kehidupan yang sibuk, namun mereka tetap menyempatkan diri untuk melakukan berbagai kegiatan santai. Dalam hal-hal seperti acara samadiyah, gotong royong, dan pertemuan lainnya di Gampong, mereka memastikan untuk hadir dan memberikan yang terbaik. Setiap orang di dusun, dari anak-anak hingga nenek-nenek, berpartisipasi dalam sistem gotong royong komunal dan keinginan kuat masyarakat untuk membantu merencanakan perayaan pernikahan.

Penyelenggaraan pemerintahan, politik, kehidupan beragama dan pembinaan akhlak dilaksanakan di bawah pimpinan Kechiek yang didukung oleh *Imuem Meunasah* sebagai kepala Gampong. Dalam membangun masyarakat, masyarakat Aceh senantiasa mengupayakan keseimbangan tersebut. Kechiek dan *Imuem* memperoleh bantuan dari tuha peut dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan pembangunan masyarakat. Sebagai wahana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kota

³⁷ Departemen P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 130.

dan Kabupaten di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh, pemerintahan Desa berpedoman pada peraturan Desa (reusam). Dengan mengedepankan asas reusan Aceh, berbagai permasalahan masyarakat dapat teratasi.³⁸

Menurut hasil penelitian penulis, agama tampak tidak dapat dipisahkan dari budaya dalam masyarakat Kabupaten Pidie. Budaya dan agama saling berkaitan erat. Meskipun budaya selalu lebih diutamakan, hal ini terlihat dari berbagai perilaku masyarakat yang terkait dengan agama. Kadang kala, unsur budaya lebih diutamakan daripada unsur agama dalam ritus-ritus tertentu. Namun, tergantung pada ritus yang dimaksud, pertimbangan agama dapat lebih diutamakan daripada pertimbangan budaya. Kehidupan sehari-hari masyarakat Pidie sangat dipengaruhi oleh budaya dan agama mereka sebagai akibat dari penyakit ini. Hal ini terlihat di banyak bagian masyarakat, seperti bagaimana desa masih terstruktur secara tradisional dan bagaimana keluarga besar masih memiliki banyak kekuatan dalam keluarga. Sebagai norma budaya dan ciri kekeluargaan, gaya struktur ini lazim di sebagian besar desa Kabupaten Pidie.³⁹

Meskipun ada berbagai jenis budaya di Aceh menurut ciri-ciri masing-masing Aceh, Kabupaten Pidie khususnya termasuk dalam kelompok yang masih padat dengan budaya dalam tatanan sosio-antropologis. Penggunaan bahasa Aceh, bahasa penduduk asli Pidie, menjadi bukti akan hal ini. Kemudian, melihatnya dari perspektif pekerjaan, petani masih menjadi mayoritas. Namun, penelitian baru menunjukkan bahwa dalam hal mencari nafkah, istri Pidie lebih berdedikasi

³⁸ Hasil Wawancara dengan Kharniadi, Kepala Camat Delima Kabupaten Pidie Pada Tanggal 13 Juni 2024.

³⁹ Ibid.

daripada suami. Suami hanya membantu beberapa keluarga, tetapi dalam kasus lain, istri yang mengurus ladang. Sementara itu, para ayah lebih suka menghabiskan waktu di kedai kopi daripada membantu, dan mereka hanya terlibat dalam manajemen lapangan untuk waktu yang singkat.⁴⁰

Di Pidie, perempuan bertanggung jawab atas dan mengoordinasikan sebagian besar tradisi dan adat istiadat, sementara laki-laki hanya mengikuti aturan dalam hal agama dan adat istiadat. Meskipun laki-laki memiliki posisi sebagai kepala rumah tangga, perempuan secara ketat menegakkan norma-norma budaya dan adat istiadat yang lebih umum. Sulit untuk mengidentifikasi pemimpin perempuan, yang menunjukkan adanya kesadaran akan perubahan hubungan gender sebagai hasilnya anggota masyarakat telah mengakui keberadaan sosial dan ekonomi perempuan, menurut para narasumber. Masyarakat Pidie yang berpendidikan memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika gender. Laki-laki di Pidie memberi perempuan keleluasaan yang lebih besar untuk mengejar karier di luar rumah atau tinggal di rumah dan membesarkan anak-anak, tetapi mereka tidak melakukan apa pun untuk memajukan perjuangan kemandirian ekonomi perempuan. Meskipun sebagian dari mereka masih percaya bahwa satu-satunya peran istri adalah mengurus rumah, tidak dianggap tabu bagi para lelaki untuk membantu pasangan mereka ketika mereka mengerjakan tugas-tugas rumah tangga.⁴¹

Dari perspektif politik, masyarakat Kabupaten Pidie telah menyadari bahwa politik mengeksploitasi mereka. Setiap partai politik yang datang ke desa-

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Faisal, Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2023.

⁴¹ Ibid.

desa di Kabupaten Pidie membanggakan tentang bagaimana kader-kadernya akan meningkatkan kehidupan desa. Pada awalnya, masyarakat antusias dan yakin akan memenangkan partai, tetapi setelah melihat bagaimana kader-kader partai berperilaku setelah mereka berkuasa, mereka tidak lagi peduli dengan warga Kabupaten Pidie.⁴² Akibatnya, warga kini lebih berhati-hati dan skeptis terhadap janji partai, bahkan dari partai lokal yang disegani. Masyarakat Pidie telah mengumpulkan banyak pengetahuan dan pengalaman selama bertahun-tahun, dan mereka telah belajar untuk membedakan antara hal-hal yang akan membantu masyarakat mereka dan hal-hal yang akan merugikan mereka. Akibatnya, saat ini mereka agak pilih-pilih tentang apa yang mereka biarkan masuk ke dalam hidup mereka, dan mereka tidak mau membiarkan apa pun masuk jika itu dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

4.2 Kepercayaan Masyarakat terhadap Anggota Legislatif Perempuan di DPRK Kabupaten Pidie Periode 2019-2024

Bukanlah fenomena keterwakilan bahwa lebih banyak perempuan terpilih untuk menduduki jabatan politik; melainkan, itu adalah hasil dari perjuangan panjang dan gigih untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mendorong lebih banyak perempuan untuk bertugas di legislatif adalah salah satu pendekatan.

Meskipun hanya ada tujuh perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilu Legislatif periode 2019–2024, tren ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik telah

⁴² Hasil Wawancara dengan Raudah, Warga Gampong Kumbang Trueng Campli Kabupaten Pidie Pada Tanggal 3 September 2023

meningkat dari periode sebelumnya. Hal dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini:

Tabel 4. 1 Daftar Nama Caleg Terpilih Tahun 2019-2024

No	Nama Caleg	Partai	Jumlah Suara	Jenis Kelamin
1.	Cut Nur Azizah	Partai Demokrat	2.456 suara	Perempuan
2.	Ida Susanti	Partai Golkar	1.718 suara	Perempuan
3.	Elidawati	Partai Aceh	1.544 suara	Perempuan
4.	Rustina	Partai Gerindra	1.368 suara	Perempuan
5.	Fauziah	Partai Kebangkitan Bangsa	1.122 suara	Perempuan
6.	Asnawati	Partai Golkar	917 suara	Perempuan
7.	Erlinawaty	Partai Demokrat	817 suara	Perempuan

Sumber: Data Kantor KIP Kabupaten Pidie

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Daerah Pemilihan (Dapil) Partai Demokrat I Cut Nur Azizah memiliki tingkat kepercayaan publik tertinggi dengan perolehan suara sebanyak 2.456 suara. Persoalan yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya perempuan yang tidak percaya dan tidak memilih perempuan untuk mewakili mereka di lembaga legislatif. Secara berkala, diperlukan metode penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih kompeten untuk mendorong partisipasi yang lebih besar, persaingan yang sehat, dan keterwakilan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah perempuan yang duduk di legislatif meningkat. Hal ini terjadi di Kabupaten Pidie pada siklus pemilu periode 2019–2024. Tujuh orang perempuan terpilih menjadi anggota legislatif dari total empat puluh satu kursi; enam orang perempuan menduduki posisi serupa di legislatif Pidie pada periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menginginkan perempuan untuk duduk di legislatif.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih dalam jabatan publik di legislatif Pidie, namun persentase perempuan yang menjabat di legislatif Kabupaten Pidie pada siklus pemilu pemilu 2019–2024 masih jauh dari

angka minimum 30% yang dipersyaratkan oleh undang-undang, meskipun banyak peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan pimpinan di pemerintahan. Mengingat adanya aturan yang mewajibkan minimal 30% keterwakilan perempuan di antara para pelamar jabatan publik, sejumlah faktor menjadi kendala sulitnya memenuhi target keterwakilan perempuan sebesar 30% di DPRK Pidie. Pertama, kekuatan laki-laki sulit diubah dalam pertarungan jual beli suara, modal politik yang besar, budaya patriarki masih kental di Pidie, dan keadaan keluarga yang sering tidak mengizinkan atau menyetujui.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Pidie kurang aktif dalam politik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa dari 40 kursi legislatif, hanya 6 orang yang mewakili kabupaten tersebut, atau sekitar 15% dari jumlah minimal 30% yang dipersyaratkan dalam UU Pemilu. Rendahnya partisipasi politik perempuan di DPRK Pidie disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengangkat perempuan dalam posisi kepemimpinan lembaga, tetapi dari perspektif perempuan yang tidak sempurna, bahkan terkadang hanya sebagai pelengkap budaya patriarki menjadi hambatan bagi aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan. Semua partai politik harus memiliki minimal 30% keterwakilan perempuan agar dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008.⁴³

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, DPRK Kabupaten Pidie akan mencermati secara ketat penggambaran perempuan. Fakta bahwa perempuan tidak memperoleh satu kursi pun di legislatif pada pemilu 2019 menjadi buktinya.

⁴³ Hasil Observasi, Kantor KIP Kabupaten Pidie Pada Tanggal 2 September 2023.

Singkatnya, partisipasi politik tidak berbeda dengan bidang kehidupan lainnya. Sayangnya, keterwakilan perempuan dalam politik tidak seimbang karena hak yang sama tidak serta merta menghasilkan kesempatan yang sama.

Selain menyoroti hak-hak perempuan khususnya hak-hak perempuan dalam politik sebagai warga negara di mana perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki perjuangan untuk mencapai 30% keterwakilan perempuan di legislatif sebenarnya memiliki sejumlah tujuan murni. Namun, memasukkan perempuan ke dalam layanan publik, partai politik, dan birokrasi bukanlah hal yang mudah. Salah satu alasannya adalah karena perempuan tidak memiliki cukup dana untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik semacam ini. Para wakil perempuan DPRK Pidie perlu menjadi advokat yang kuat untuk kesetaraan gender, sebuah perjuangan yang sering kali dikesampingkan oleh partai yang berkuasa dan pemerintah. Oleh karena itu, perempuan di Kabupaten Pidie perlu membuat pakta untuk membela diri mereka sendiri.

Terkait pemilihan anggota DPRK di Kabupaten Pidie, partai politik memegang peranan penting dalam pemenuhan kuota 30% perempuan. Hal ini tidak hanya berlaku pada saat pemilihan anggota DPRK itu sendiri, tetapi juga pada saat kampanye dan setelahnya. Setelah itu, peneliti berbincang dengan Erlinawaty, yang merupakan anggota DPRK Pidie, untuk mengetahui bagaimana partai politik membantu memenuhi target keterwakilan 30% perempuan di DPRK.

Erlinawaty mengatakan:

“Politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemenuhan kuota perempuan di parlemen melalui pembentukan partai politik. Tentu saja, sebagai kader partai politik, kita senantiasa berupaya untuk merekrut kader-kader yang paling berkualitas, khususnya perempuan. Partisipasi perempuan tidak hanya terbatas pada proses pemilihan. Artinya, upaya selanjutnya akan berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah dengan

menyelenggarakan forum tempat perempuan dari semua lapisan masyarakat dapat bebas menyampaikan pendapat dan menyampaikan tujuan mereka. Selain itu, forum ini juga akan menyediakan dana untuk inisiatif-inisiatif yang membantu perempuan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan menjadi lebih aktif dalam berpolitik”.⁴⁴

Lebih lanjut, penulis berbincang dengan Ida Susanti, kader Partai Golkar, dan ia menambahkan:

“Anggota kader dari kedua jenis kelamin memiliki hak yang sama. Baik dalam hal politik maupun dalam masyarakat. Semua pihak, bukan hanya partai politik, memiliki peran untuk memastikan bahwa perempuan memegang posisi kekuasaan. Setiap perempuan harus tahu bahwa semakin banyak perempuan, semakin baik. Setelah itu, pertemuan akan menyiapkan platform yang paling sesuai untuk mereka. Akibatnya, berbagai fraksi politik tentu memiliki persyaratan yang berbeda untuk kader perempuan”.⁴⁵

Kemudian Bapak Teuku Saifullah TS dari Partai Golkar juga mengatakan bahwa:

“Bagi partai Golkar kita tidak pernah memandang perempuan itu sebagai pelengkap, sehingga dalam susunan nomor urut perempuan juga kita istimewa, tidak dibeda-bedakan. Ini diktete sudah keluar malah beberapa dari perempuan yang hadir sebagai caleg Golkar kedepan malah dapil 1 perempuan menduduki nomor 2 dan nomor 4, di dapil 2 nomor urut 2 juga dan nomor urut 6, di dapil 3 juga demikian di nomor urut 3 dan 6, di dapil 4 malah nomor 1 nya perempuan, kemudian nomor urut 5. makanya begitu kita mengapresiasi perempuan yang punya kemampuan dan yang ingin berjuang dan juga mempunyai kapasitas sehingga tidak menjadikan perempuan sebagai pelengkap”.⁴⁶

Wawancara di atas memberikan bukti bahwa partai politik di Kabupaten Pidie secara aktif berupaya untuk meningkatkan standar wacana politik dengan mengambil bagian dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk membina

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Erlinawaty, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ida Susanti, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Teuku Saifullah TS, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 15 Agustus 2023.

generasi pemimpin perempuan yang tangguh. Oleh karena itu, representasi yang adil dalam politik merupakan indikator yang baik untuk kualitas suatu daerah, menurut teori partisipasi politik. Adalah tugas semua orang untuk memastikan bahwa perempuan memiliki suara di lembaga legislatif kita. Penulis berkeyakinan bahwa kehadiran perempuan di lembaga legislatif dapat meningkat secara langsung berkorelasi dengan kualitas perempuan, terlepas dari partai politiknya.

Karena kebijakan dan inisiatif pembangunan DPRK Pidie sebagian dibentuk oleh keanggotaannya, sangat penting bagi perempuan untuk memiliki suara dalam organisasi-organisasi ini. Dengan menempatkan lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan di DPRK Pidie, kita dapat memastikan bahwa suara, perhatian, dan tujuan mereka didengar dan dipertimbangkan. Kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan hak-hak reproduksi hanyalah beberapa contoh kebijakan progresif yang dapat mengambil manfaat dari populasi perempuan DPRK Pidie.

Dengan dugaan terkait tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon anggota legislatif perempuan DPRK Kabupaten Pidie maka peneliti melakukan wawancara singkat kepada dua pemilih yang ikut berpartisipasi pada Pemilu Tahun 2019. Dengan informan pertama, Siti menjelaskan bahwasanya:

“Saya masih memiliki keraguan dalam memilih orang legislatif dari kalangan perempuan sebab untuk kemampuannya masih jauh dibandingkan dengan laki-laki.⁴⁷

Selaras dengan kalimat yang disampaikan oleh informan pertama, Fitriani sebagai pemilih perempuan juga menjelaskan terkait janji-janji kampanye calon

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Siti, Warga Gampong Kumbang Trueng Campli Kabupaten Pidie Pada Tanggal 11 Juli 2024.

legislatif perempuan yang dirasa belum terealisasikan, dengan kutipan sebagai berikut:

“Saya sudah kecewa saja melihat sikap mereka yang hanya banyak janji saat kampanye, karena saya pernah dijanjikan oleh calon legislatif perempuan yang ternyata ketika sudah naik, janji tersebut hanya sekedar omongan belaka. Jadi melihat calon-calon anggota legislatif dari perempuan bawaannya saya tidak percaya saja.⁴⁸

Dan pernyataan tersebut memiliki pandangan yang cukup berbeda dari anggota legislatif perempuan Erlinawaty, terkait kemampuan caleg perempuan dengan pengaruh perilaku memilih seorang pemilih perempuan, dengan kutipan sebagai berikut:

“Sebenarnya kekuatan dari perempuan sendiri adalah perhatian dimana hal ini menjadi perbedaan utama dalam kemampuan terhadap caleg laki-laki. Dan saya merasa dari segi kualitas pun dari caleg laki-laki banyak juga yang tidak berkualitas jika hal kualitas menjadi komparasi dengan caleg perempuan itu sendiri. Jadi terkait krisis pemilih perempuan belum memilih caleg perempuan rasa saya memang karena persoalan kemampuan atau kualitas. Seperti masih banyak dari caleg perempuan yang belum turun ke lapangan, bertemu langsung dan memberikan manfaatnya saat kampanye kepada masyarakat. Sehingga saat pemilihan, caleg perempuan dikenal dan turut dipilih.⁴⁹

Peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya kepercayaan publik terhadap calon legislatif perempuan adalah akar alasan kekalahan elektoral mereka mengingat klaim dan peristiwa yang disebutkan di atas.

Berikut beberapa pendapat dari informan yang peneliti temui, diantaranya adalah pendapat yang telah dipaparkan oleh Bu Raudatul Aini. Secara singkat beliau setuju jika perempuan menjadi pemimpin.

“Sangat setuju, karena perempuan ini juga sangat diperlukan di ruang publik agar mampu menyuarakan apa-apa yang menjadi kebutuhan

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Fitriani, Warga Gampong Kumbang Trueng Campli Kabupaten Pidie Pada Tanggal 11 Juli 2024.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Erlinawaty, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023

perempuan. Selain beliau mendukung perempuan untuk aktif di publik, perempuan juga jangan sampai lupa dengan kodratnya sebagai perempuan, karena dengan perempuan itu mampu menjalankan keduanya dengan seimbang maka perempuan akan mendapatkan kepercayaan dan juga ijin terutama dari keluarga.⁵⁰

Pendapat yang diungkapkan oleh Bu Raudatul Aini juga selaras dengan apa yang diungkapkan dengan Pak Faisal beliau sangat setuju apabila perempuan menjadi politik, dengan catatan harus kompeten dan berkarakter. Beliau juga mengatakan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat biasanya masyarakat akan menilai seorang itu cakap atau tidak bisa dilihat dari akhlak atau kesehariannya dan latar belakang keluarganya juga tidak kalah penting. Hasil wawancara dengan masyarakat umum dengan informan Faisal mengenai bagaimana pendapat anda tentang perempuan yang menjabat sebagai anggota legislatif mengatakan bahwa:

“Perempuan boleh menjabat sebagai legislatif atau jabatan lainnya di pemerintahan karena memang Undang-undang juga memberikan ruang partisipasi bagi perempuan dan laki-laki”.⁵¹

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat umum dengan informan Raudah mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kehadiran anggota perempuan yang menjawab di DPRK dalam kursi legislatif adalah untuk melakukan keharmonisan dalam dunia politik dan dapat mengemukakan hak-hak perempuan yang ada di Kabupaten Pidie”.⁵²

Kemudian wawancara dengan salah satu Staf Kantor Camat Delima Bapak Kharniadi mengatakan bahwa:

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Raudatul Aini, Warga Gampong Kumbang Trueng Campli Kabupaten Pidie Pada Tanggal 11 Juli 2024.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Faisal, Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2023.

⁵² Hasil Wawancara dengan Raudah, Warga Gampong Kumbang Trueng Campli Kabupaten Pidie Pada Tanggal 3 September 2023.

“Perempuan yang menjabat sebagai anggota legislatif merupakan kemajuan disuatu daerah karena dalam undang-undang quota 30% perempuan. Dengan adanya kehadiran anggota perempuan di DPRK Pidie menjadi suatu perubahan bagi perempuan agar hak-hak perempuan dapat didengar”.⁵³

Secara historis, perempuan telah berasimilasi ke dalam peran gender tertentu dan diharapkan untuk tetap berada di luar kehidupan publik dan politik karena konstruksi sosial dan politik. Perempuan menghadapi hambatan dua kali lebih banyak daripada laki-laki ketika mencoba masuk ke dunia politik. Diharapkan bahwa perempuan menjunjung tinggi tingkat keunggulan dan standar yang sama dengan laki-laki. Selama pemikiran patriarki masih ada, perempuan akan menghadapi hambatan besar dalam mencapai tujuan ini. Kesenjangan gender, juga dikenal sebagai ketidakadilan gender, adalah kesenjangan yang dibangun secara sosial antara jenis kelamin yang ada di setiap sektor masyarakat. Khususnya dalam politik, norma budaya patriarki harus disalahkan atas kesenjangan gender. Mengenai apakah ada hambatan untuk duduk di parlemen di DPRK Pidie. Berdasarkan hasil wawancara melalui whatsapp dengan informan DPRK Pidie Ibu Erlinawaty mengatakan bahwa:

“Dimana yang menjadi informan adalah politisi perempuan (Erlinawaty) menyatakan bermacam-macam hambatannya, apa lagi kita perempuan contohnya persaingan dalam satu dapil dalam hal memperoleh no. urut, kemudian cara bersosialisasi dalam masyarakat untuk mendapatkan dukungan pasti kita cari kaum perempuan, yang sulitnya kaum perempuan sendiri masih sedikit yang percaya sesama satu gender untuk duduk di parlemen”.⁵⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan DPRK Pidie Ibu Susanti mengatakan bahwa:

⁵³ Hasil Wawancara dengan Kharniadi, Staf Kantor Camat Delima Kabupaten Pidie Pada Tanggal 13 Juni 2024.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Erlinawaty, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023.

“Ketidaktahuan masyarakat terhadap kandidat perempuan, tidak adanya sekutu perempuan, dan pendidikan politik yang buruk bagi perempuan yang dicalonkan semuanya bertentangan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang bertugas di legislatif Kabupaten Pidie”.⁵⁵

Demokrasi yang lebih substansial di Indonesia tidak dapat dicapai sampai perempuan lebih aktif terlibat dalam politik dan memiliki suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan. Pengakuan yang meluas terhadap hak politik perempuan tidak menjamin keberadaan pemerintahan atau sistem politik yang demokratis di mana nilai-nilai partisipasi, representasi, dan akuntabilitas benar-benar terwujud. Artinya, meskipun hak politik perempuan telah diakui, hal itu tidak serta merta mengarah pada penerapan kebijakan yang peka gender atau kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan. Semua warga negara, termasuk perempuan, harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dalam menjalankan hak-hak demokratis mereka.⁵⁶

Hasil wawancara dengan masyarakat umum dengan informan Faisal dan Raudah mengenai apa faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap legislatif perempuan di Kabupaten Pidie periode 2019-2024:

“Menurut bapak Faisal karena para pemilih/masyarakat di Pidie juga sadar akan keberadaan kaum perempuan dalam partisipasi pembangunan yang berkelanjutan di kabupaten Pidie. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan masyarakat di kabupaten Pidie, mayoritas beragama islam, di Pidie perempuan boleh mengisi ruang-ruang publik sesuai dengan kompetensi dan kapasitas, dulu kita lihat perempuan di Pidie minim mengisi jabatan-jabatan tertentu baik di pemerintahan atau di bidang swasta, hal ini dikarenakan memang faktor lulusan jenjang pendidikan di perguruan tinggi kaum perempuan di Pidie memang minim,

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ida Susanti, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023.

⁵⁶ Feni Arlina, 2019 “Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol.7, No. 4

tetapi selama sepuluh tahun terakhir, kaum perempuan sudah banyak yang menempuh jenjang pendidikan di Perguruan tinggi”.⁵⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat umum dengan informan dengan ibu Raudah menyatakan bahwa:

Selama kurun waktu 2019 hingga 2024, Raudah mengklaim bahwa pendidikan, budaya, dan agama akan memainkan peran penting dalam mengangkat representasi perempuan di Kabupaten Pidie. Hal utama adalah karena ruang publik juga harus adanya perempuan supaya dalam mengambil kebijakan nantinya adanya program-program yang mendukung kaum perempuan baik dibidang pendidikan, politik, sosial dan budaya”.⁵⁸

Warga Kabupaten Pidie waspada terhadap kandidat perempuan untuk jabatan publik. Pekerjaan rumah tangga adalah ranah eksklusif perempuan, menurut mereka. Mereka cenderung tidak mendukung kandidat perempuan untuk jabatan legislatif karena berbagai alasan, termasuk kurangnya keakraban dengan para kandidat dan skeptisisme yang melekat tentang kualifikasi mereka. Melihat banyaknya warga Pidie yang kurang percaya pada kemampuan perempuan untuk maju dalam pemilihan legislatif, mereka berpendapat seperti:

1. Keterampilan dan latar belakang, mereka yang ingin berkarier di bidang politik harus mengutamakan keterampilan dan pengalaman kerja yang diperlukan. Untuk membawa daerahnya menuju kemakmuran dan kemajuan, masyarakat Pidie pun percaya bahwa politisi yang dapat dipercaya harus memiliki pengalaman dan kemampuan yang diperlukan. Namun, tidak semua orang sependapat dengan pandangan ini; yang lain berpendapat bahwa perempuan harus segera mulai bertugas di parlemen

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Faisal, Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2023.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Raudah, Warga Gampong Kumbang Trueng Campli Kabupaten Pidie Pada Tanggal 3 September 2023.

terlepas dari kualifikasi mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seseorang perlu berusaha untuk mencalonkan diri di legislatif.

2. Norma budaya. Ada kepercayaan kuat pada superioritas laki-laki dalam masyarakat patriarki ini. Agar kepemimpinan laki-laki menjadi norma dalam masyarakat. Selain itu, warga Kabupaten Pidie beragam; misalnya, beberapa adalah pekerja transmigran, sehingga penting untuk mempertimbangkan keadaan mereka saat memilih anggota legislatif. Selain itu, ada warga Pidie yang sudah mulai memahami gender dan karenanya sangat mendukung perempuan untuk mencalonkan diri.

3. Status sosial seseorang. Untuk memudahkan perempuan maju ke pemilihan legislatif, partai-partai tertentu dapat memengaruhi proses tersebut dengan mendukung kandidat perempuan untuk menduduki jabatan. Hal ini akan membangun otoritas, yang kemudian dapat digunakan untuk campur tangan, yang menyebabkan masyarakat dengan sengaja mengikutinya dan menganggapnya sebagai hal yang wajar.

Calon legislatif perempuan di Kabupaten Pidie menghadapi beberapa tantangan, termasuk budaya patriarki yang merajalela, minimnya kandidat yang memenuhi syarat, kurangnya dukungan dari teman dan keluarga, dan partai politik yang gagal terlibat dalam pelatihan kader. Partai-partai dapat mengamankan kuota 30% untuk perempuan hanya dengan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan legislatif 2014.

Hasil penelitian ini akan mencakup informasi yang berkaitan dengan kesulitan yang disebutkan, khususnya menguraikan elemen-elemen yang mendorong keterwakilan perempuan di Kabupaten Pidie, Republik Rakyat

Demokratik Korea dari tahun 2019 hingga 2024. Ada banyak elemen yang bergerak dalam hal jumlah perempuan yang bertugas di badan legislatif DPRK Kabupaten Pidie. Wawancara dengan Ida Susanti menghasilkan hasil sebagai berikut:

“Budaya patriarki membatasi kesempatan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan politik, yang pada gilirannya mengurangi representasi mereka di legislatif. Akibatnya, suara politik perempuan cenderung tidak didengar dan upaya mereka untuk menduduki jabatan legislatif kurang didanai. Masalahnya adalah bahwa sedikit orang masih memiliki kepercayaan pada perempuan untuk menduduki jabatan publik”.⁵⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Erlinawaty mengatakan bahwa:

“Untuk memenuhi kuota 30% cara yang harus di kerjakan perempuan untuk mengisi regulasi 30% ialah dengan pembelajaran atau pemahaman tentang politik kepada perempuan secara menyeluruh, pendidikan dalam berorganisasi bagi kaum perempuan sangatlah di butuhkan”. Seperti yang ditunjukkan Erlinawaty, hal ini tidak mengherankan mengingat nilai dan norma budaya kita menganggap perempuan kurang dihargai daripada laki-laki. Patriarki, yang masih lazim di masyarakat kita, merupakan faktor utama yang memengaruhi representasi perempuan di lembaga legislatif.⁶⁰

Sebagai akibat dari kesenjangan gender yang terus berlanjut dalam kekuasaan, perempuan masih menghadapi hambatan yang signifikan ketika mencoba agar suaranya didengar dalam wacana politik. Menurut pandangan ini, perempuan harus tinggal di rumah dan laki-laki harus terlibat dalam kehidupan publik. Hasilnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan secara tidak adil diberi tanggung jawab yang berbeda.

Sudah pasti akan ada kampanye untuk meningkatkan representasi perempuan di badan legislatif. Ketika persentase perempuan dalam suatu

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ida Susanti, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 15 Agustus 2023

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Erlinawaty, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023

organisasi mencapai 20% atau lebih, itu mulai membuat perbedaan. Dengan memperluas jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan politik, kita dapat lebih memastikan bahwa perempuan dan masyarakat secara keseluruhan memiliki suara dalam pilihan yang memengaruhi bagaimana sumber daya didistribusikan dan bagaimana kita dapat meningkatkan standar hidup untuk semua. Akibatnya, sangat penting bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Untuk memerangi diskriminasi yang mereka hadapi, perempuan harus terjun ke dunia politik. Baru setelah itu mereka dapat memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka.

Fokus di sini adalah pada representasi secara umum, bukan hanya representasi perempuan yang dapat diukur secara numerik. Lebih jauh, jika menyangkut topik keterlibatan pemilih perempuan dalam representasi anggota parlemen perempuan, sudah sepantasnya pemilih perempuan berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pikiran, pendapat, dan harapan mereka kepada anggota parlemen perempuan. Sederhananya, keinginan masyarakat sangat jelas ketika anggota parlemen perempuan menyuarakan gagasan mereka. Lebih jauh, menurut wawancara dengan anggota DPRK Pidie, Ida Susanti, yang menyatakan:

“Saat ini, jumlah anggota parlemen perempuan masih sangat sedikit. Meskipun demikian, tekad untuk membuat perbedaan yang konstruktif di masyarakat tetap tidak berkurang. Beberapa faktor memengaruhi persentase perempuan dalam posisi legislatif; salah satunya adalah budaya, dalam masyarakat di mana perempuan dipandang sebagai pemimpin yang tidak konvensional. Misalnya, ada tradisi bahwa istri negara harus mendapatkan persetujuan suami mereka sebelum meninggalkan rumah. Perempuan cenderung tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik ketika mereka kurang mampu secara ekonomi karena mereka lebih peduli untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.”⁶¹

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ida Susanti, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023

Hal ini menyebabkan perempuan sulit bersaing dengan laki-laki yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih mapan, menurut hasil wawancara tersebut. Masih banyak perempuan yang tidak memiliki akses terhadap kesempatan pendidikan yang memadai, sehingga menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam peran kepemimpinan politik. Lebih jauh, keberadaan perempuan di DPRK Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh aspek partai politik, khususnya struktur politik Kabupaten Pidie yang didominasi laki-laki. Berdasarkan keterangan informan, masalah budaya, ekonomi, pendidikan, dan kepartaian semuanya berperan dalam rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Pidie.

Pengawasan berbasis gender dan perjuangan berkelanjutan dalam proses politik di DPRK Pidie harus terus dilakukan agar keterwakilan perempuan dapat meningkat. Oleh karena itu, kelompok dan fraksi politik DPRK Pidie harus menyusun rencana untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah perempuan yang bertugas di parlemen.

Fraksi dari setiap partai politik dapat bekerja sama untuk mempromosikan dan mempertahankan kuota 30% bagi perempuan dalam peran kepemimpinan politik dan dalam pemilihan kandidat untuk badan legislatif negara bagian sebagai pendekatan tindakan afirmatif.

Keterwakilan perempuan belum mencapai target, meskipun ada persyaratan tindakan afirmatif sebesar 30%. Meskipun ada peningkatan, hal itu belum memenuhi harapan; variabel lain mungkin berperan di sini. Berbagai masalah sosial, termasuk norma budaya, pencapaian pendidikan, status ekonomi, dan dinamika keluarga, berperan; lagi pula, perempuan tidak dapat memasuki

dunia politik tanpa persetujuan dari pasangan laki-laki mereka. Calon legislatif perempuan berhadapan dengan bidang yang didominasi laki-laki dalam persaingan langsung karena pengaruh uang yang merajalela dalam politik. Perempuan merupakan wakil rakyat sekaligus anggota fraksi, tetapi mereka kurang terwakili dalam peran kepemimpinan, yang membuat mereka sulit untuk berbicara tentang isu-isu perempuan.

4.3 Strategi Politisi Perempuan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Strategi dalam politik melibatkan pendekatan yang berbeda yang digunakan oleh setiap kandidat, dengan calon legislatif perempuan khususnya terlibat dalam pencalonan diri dan menggunakan berbagai taktik untuk mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihan masing-masing. Memperoleh kepercayaan publik terutama tergantung pada strategi yang telah diumumkan.

Dengan mengirimkan kader untuk bertemu langsung dengan penduduk desa dan menekankan perlunya pendidikan politik, politisi di DPRK Kabupaten Pidie berupaya untuk memenangkan lebih banyak suara. Mendorong partai politik untuk mencalonkan calon perempuan untuk posisi legislatif merupakan salah satu cara untuk memperkuat demokrasi. Cara lain adalah dengan memastikan bahwa anggota parlemen perempuan yang terpilih memenuhi tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Terakhir, lembaga penyelenggara pemilu harus mampu memberikan sosialisasi yang lebih dari sekadar fokus pada keterwakilan perempuan sebesar 30%. Jika hal ini tidak berhasil, maka perlu dilakukan pembaruan Kuota Anggota DPRK Pidie yang khusus untuk perempuan.

Sayangnya, masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie masih belum memahami tentang partisipasi politik perempuan, kekuatan politik lokal yang lebih mengutamakan emosi daripada pengambilan keputusan rasional, dan masih kuatnya budaya patriarki yang membuat perempuan merasa tidak mampu untuk bertahan di bidang yang didominasi laki-laki.

Karena tidak banyak politisi perempuan yang dikenal di DPRK Pidie, partai politik mengandalkan kadernya untuk memenuhi kuota gender, sehingga masyarakat sulit percaya pada representasi perempuan di legislatif. Karena persentase perempuan yang menjabat di legislatif terus menurun selama bertahun-tahun, jelas bahwa masyarakat umum Kabupaten Pidie memandang partisipasi politik perempuan dengan skeptis. Calon legislatif, terutama dari Kabupaten Pidie, harus bekerja keras untuk memenangkan kepercayaan publik.

Menggunakan berbagai teknik untuk menerapkan strategi kemenangan sangatlah penting. Calon yang dipilih untuk jabatan publik berdasarkan citra mereka dapat mengadopsi strategi yang akan diuji selama masa jabatan mereka. Ini adalah kesempatan yang fantastis bagi perempuan untuk mengekspresikan hak-hak mereka yang tidak terucapkan, terutama yang berkaitan dengan representasi mereka di legislatif. Mereka memperkenalkan diri kepada masyarakat, menggunakan pendekatan yang unik untuk memenangkan simpati publik, dan bergabung dalam kegiatan komunal seperti studi agama sebagai bagian dari strategi mereka untuk memenangkan pemilihan.

Salah satu anggota yang memenangkan pemilihan legislatif di DPRK Kabupaten Pidie yaitu Erlinawaty dari Partai Demokrat memiliki strategi-strategi dalam pemenangannya dan tidak luput dari adanya peran partai politik dalam

pemenangan. Sedangkan legislatif perempuan lainnya ada dari partai Golkar yaitu Ida Susanti juga memiliki strategi-strategi politik dalam memenangkan pemilihan. Adapun strategi politisi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan membentuk tim sukses dan melaksanakan kampanye.

Salah satunya dari hasil wawancara dengan ibu Erlinawaty mengatakan bahwa:

“Untuk saya pribadi sebagai caleg menurut saya mengapa harus adanya pembentukan tim sukses karena dengan adanya tim sukses dapat membantu saya untuk menjembatani pertemuan antara Caleg dengan warga masyarakat/Wajib pilih di daerah pemilihan. Dengan adanya Tim sukses juga dapat membantu saya dalam melancarkan urusan program-program yang saya buat untuk masyarakat. Dan juga melakukan kampanye pada masyarakat sekitar tentang program-program yang saya lakukan dan mengkaji apa saja yang diperlukan oleh masyarakat”.⁶²

Hal di atas di jelaskan oleh anggota legislatif perempuan atas nama Erlinawaty Mengatakan bahwa:

“Dalam pemilihan ini, kita tahu bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Pasti ada laki-laki dan perempuan di tim pemenang, kan? Saya pilih laki-laki dan perempuan karena saya yakin mereka bisa memberi saya kesempatan untuk maju dalam pemilihan Kabupaten Pidie”.⁶³

Erlinawaty merupakan anggota legislatif perempuan dari Partai Demokrat. Strategi yang dijalankan oleh Ibu Erlinawaty pertama yaitu membentuk relawan yang merupakan hasil dari simpatisan orang-orang terdekat. Relawan Ibu Erlinawaty didominasi oleh laki-laki karena Ibu Erlinawaty memang lebih sering dan nyaman berinteraksi dengan laki-laki terutama pemuda yang dianggap anak oleh Ibu Erlinawaty. Peneliti dapat menganalisis jika perempuan memanfaatkan laki-laki sebagai tim sukses untuk terjun ke lapangan dalam rangka meningkatkan

⁶² Hasil Wawancara dengan Erlinawaty, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023

⁶³ Ibid.

jumlah pemilih. Hal ini disebabkan akibat banyak situasi dan kondisi dimana perempuan tidak bisa mengerjakannya, terlihat jika perempuan sangat membutuhkan peran laki-laki dalam membantu mereka selama proses pemilu agar kegiatan pendekatan dengan masyarakat berjalan dengan lancar.

Strategi kedua yaitu melaksanakan kampanye. Dalam berkampanye, Ibu Erlinawaty langsung terjun ke masyarakat dengan mencari tahu apa kebutuhan atau masalah yang harus diselesaikan. Ia tidak menawarkan program tetapi lebih mencari tahu apa program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Perempuan dapat menjadi pendengar yang baik bagi masyarakat karena mampu mendengar keluh kesah masyarakat dan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam suatu kebijakan saat mereka menjadi anggota legislatif.

Dari wawancara di atas peneliti mengamati tentang strategi yang digunakan Erlinawaty untuk pembentukan tim sukses agar dapat membantu menjembatani caleg dan masyarakat dengan adanya hal ini dapat membantu Erlinawaty agar lebih dekat dengan masyarakat. Setiap wilayah pemilihan memiliki anggota tim sukses atau tim pemenang sebagai koordinasi pada wilayah tersebut. Dengan adanya tim pemenang ini, akan lebih banyak perempuan yang merasa nyaman untuk memilih calon perempuan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Ida Susanti anggota DPRK Pidie strategi untuk memilih caleg perempuan di Kabupaten Pidie:

“Ibu Ida Susanti menyatakan bahwa dalam situasi ini, jalan terbaik adalah bersatu sebagai tim yang kuat untuk mencapai tujuan kita, baik tujuan yang berkaitan dengan bidang ini maupun hal-hal lainnya. Kita juga bisa menjalankan kampanye yang efektif untuk menunjukkan kualifikasi saya sebagai calon anggota legislatif untuk distrik Pidie di DPRK Pidie”.⁶⁴

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ida Susanti, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023

Ida Susanti merupakan seorang anggota legislatif perempuan dari Partai Golkar yang sangat sukses dalam berpolitik. Terdapat tiga strategi yang dijalankan oleh Ibu Ida Susanti. Pertama yaitu membentuk tim sukses untuk membantu Ibu Ida Susanti dengan memperkenalkan sosok beliau, memaparkan rekam jejak dan program yang telah dijalankan Ibu Ida Susanti. Tidak hanya itu, timses sangat penting keberadaannya untuk melakukan pendekatan dalam rangka memenangkan kepercayaan masyarakat.

Strategi kedua adalah melaksanakan kampanye dengan menunjukkan kapasitas dan kualitas dirinya kepada masyarakat saat menjalankan. Kampanye lebih cenderung mendatangi dan menjemput aspirasi masyarakat secara langsung. Ibu Ida Susanti dibantu tim datang menemui masyarakat dengan menanyakan apa masalah yang dirasakan masyarakat dan bersamasama mendiskusikan sekiranya program apa yang bisa dibuat untuk mengatasi masalah yang ada.

Strategi selanjutnya ialah peningkatan program kerja. Ibu Ida Susanti menarik minat masyarakat dengan meningkatkan program yang sudah dirasakan positif oleh masyarakat. Masyarakat yang telah memperoleh manfaat dari program tersebut maupun yang belum tentu akan senang jika program ini ditingkatkan sehingga akan banyak masyarakat yang memperoleh dampak positifnya.

Jadi, baik mencalonkan diri atau pernah menjadi anggota dewan sebelumnya, tidak boleh berhenti belajar dan berkembang. Karena bias budaya, masyarakat masih memandang perempuan sebagai yang paling bertanggung jawab atas tugas-tugas domestik dan memiliki kesan negatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Dari pernyataan di atas peneliti mengamati bahwa adanya tim sukses melancarkan segala kegiatan di lapangan dan mampu menyejahterakan masyarakatnya serta mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu strategi untuk kemenangan Ida Susanti pada pemilu legislatif 2019 Kabupaten Pidie.

Anggota legislatif perempuan mendasarkan kebijakan dan program mereka pada kebutuhan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan dimana setiap kepentingan atau kebutuhan masyarakat akan diakomodasikan untuk rencana penyusunan kebijakan. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat diperhitungkan saat menetapkan kebijakan dan inisiatif. Bila ada anggota legislatif perempuan, masyarakat, khususnya perempuan, mengharapkannya untuk menjadi corong mereka dan memastikan bahwa hukum berlaku adil bagi kedua jenis kelamin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Erlinawaty mengatakan bahwa:

“Dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah mendidik dan melatih anggota masyarakat, khususnya perempuan, agar mereka memahami dan menggunakan hak-hak mereka. Pelatihan ini akan membahas tentang pelatihan kepekaan gender, perlindungan hak-hak perempuan, dan topik-topik terkait lainnya. Tujuan lainnya adalah meningkatkan jumlah kandidat perempuan yang memenuhi syarat untuk jabatan legislatif, meningkatkan keterampilan legislatif anggota dewan perempuan, dan memberdayakan perempuan untuk mengambil sebanyak mungkin tanggung jawab dan peran dalam pemerintahan”.⁶⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Ida Susanti anggota DPRK Pidie strategi untuk memilih caleg perempuan di Kabupaten Pidie:

“Dalam situasi ini, menurut Ibu Ida Susanti, seseorang dapat berupaya meningkatkan kualitas dirinya dengan berbagai cara seperti memperoleh pendidikan yang baik dan aktif di masyarakat. Hal ini akan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Erlinawaty, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023

membantu mereka mendapatkan kepercayaan dan menunjukkan kompetensi mereka”.⁶⁶

Tujuan utama dari taktik ini adalah untuk meningkatkan profil kandidat perempuan hingga mereka benar-benar dipertimbangkan untuk menduduki jabatan publik. Setelah membangun kredibilitas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui kegiatan seperti pendidikan dan sosialisasi, mereka akan mampu meraih kepercayaan masyarakat dan berupaya meningkatkan kualitas hidup semua orang, khususnya di Kabupaten Pidie.

Jika partai politik serius ingin meningkatkan jumlah perempuan di posisi legislatif, penulis berpendapat bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk membantu para kandidat perempuan mendapatkan dukungan dari rekan-rekan perempuan mereka dengan menumbuhkan lingkungan di mana perempuan dapat belajar dan berkembang secara profesional. Perempuan kader harus berani dalam mengadvokasi kesetaraan gender dan pemajuan hak-hak perempuan, termasuk emansipasi perempuan di berbagai bidang masyarakat. Bagian inilah yang akan diperhatikan oleh masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa para kandidat legislatif perempuan, khususnya yang mencalonkan diri untuk jabatan di Kabupaten Pidie, perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberadaan perempuan di posisi legislatif dan berupaya menghilangkan stereotip tentang perempuan dalam peran kepemimpinan, seperti gagasan bahwa mereka rapuh secara emosional, tidak mampu berpikir kritis, dan tidak mampu membuat keputusan yang tepat. Selain itu, diperlukan rencana untuk menunjukkan bahwa perempuan sama cakupannya

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ida Susanti, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023

dengan laki-laki dalam hal peran kepemimpinan. Pendekatan ini dapat diwujudkan dengan memasukkan konten kesetaraan gender ke dalam kurikulum sekolah dan menyelenggarakan upaya sosialisasi di seluruh masyarakat untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Menurut Ibu Erlinawaty, berikut berdasarkan wawancaranya dengan para informan:

“Kepentingan partai sama sekali tidak memengaruhi proses pencalonan DPRK yang diputuskan oleh masyarakat. Ini berarti bahwa partai politik di DPRK hadir atas dasar kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, saya yakin akan sulit untuk memuaskan kepentingan partai atau pemerintah daerah dengan metode pemilihan saat ini”.⁶⁷

Untuk menjawab berbagai kepentingan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan cakupan isu yang memengaruhi perempuan dan anak, hasil wawancara menunjukkan bahwa posisi legislatif saat ini diisi sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan berdasarkan keberadaan kelompok yang diwakilinya. Hal ini khususnya berlaku di Kabupaten Pidie. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa DPRK Pidie secara historis telah memberikan representasi bagi kelompok sosial tertentu, salah satunya adalah perempuan.

Anggota parlemen perempuan menganggap kesetaraan gender dalam peran pengambilan keputusan sebagai hal yang penting untuk memajukan hak-hak perempuan dan memberantas bias gender. Sikap politik yang lebih bersahabat dan berkepala dingin ditimbulkan oleh kehadiran perempuan, dan kemampuan mereka untuk mengelola lebih banyak dari hati membantu menangkal keserakahan anggota parlemen laki-laki. Sejalan dengan argumen Joni Lovenduski tentang pentingnya perempuan dalam politik, pernyataan ini mengemukakan tiga poin

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Erlinawaty, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023

utama: pertama, bahwa representasi tidak boleh dimonopoli oleh laki-laki; kedua, bahwa keterlibatan perempuan akan membuat politik lebih konstruktif dan ramah; dan ketiga, bahwa perempuan akan membawa perspektif dan gaya yang unik ke meja perundingan.⁶⁸

Sebagai pemilih di Kabupaten Pidie, kami menyesalkan bahwa masyarakat belum menanggapi secara positif pentingnya keterlibatan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan ini. Legislator yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan melihat realitas politik ini sebagai gejala yang berasal dari kombinasi berbagai faktor, termasuk persepsi pemilih terhadap masyarakat dan kebijakan serta persepsi publik terhadap kandidat perempuan. Anggota parlemen perempuan juga berpandangan bahwa isu budaya memengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, bahwa partai politik bodoh dalam hal merekrut perempuan, dan bahwa sumber daya dan modal sosial perempuan kurang dimanfaatkan.

Dengan demikian, tingkat keterwakilan perempuan lebih penting bagi sebagian masyarakat dibandingkan bagi sebagian masyarakat lainnya. Kehadiran perempuan di Kabupaten Pidie memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap mereka yang mempunyai tingkat kepentingan politik yang berbeda. Mereka yang memiliki kesadaran politik rendah atau tinggi tampaknya tidak terpengaruh oleh banyaknya perempuan yang menduduki jabatan. Di antara masyarakat yang cukup sadar, kepercayaan perempuan terhadap pemerintah tampak tumbuh sementara kepercayaan laki-laki menurun sebagai akibat dari lebih banyaknya representasi perempuan.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 210-211.

Untuk mendapatkan kepercayaan keterwakilan perempuan di legislatif DPRK Pidie di tengah masyarakat itu sangat sulit, hal ini disebabkan minimnya tokoh yang mencolok dalam politik sehingga partai politik hanya mencari kadernya untuk pemenuhan kuota sebatas dalam politik. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam politik dapat dilihat dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam legislatif. Sehingga perlu upaya dari caleg perempuan untuk meningkatkan kepercayaan di masyarakat khususnya di Kabupaten Pidie dalam pemilihan legislatif, seperti kinerja, keperdulian, akuntabilitas atau komitmen dan keandalan. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka dalam hal ini saya akan meningkatkan kinerja atau kemampuan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, peduli terhadap masalah masyarakat juga sering muncul dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, memberikan fasilitas kesehatan dan ekonomi dan juga bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang ambil, serta selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa kepentingan publik terlayani dengan baik dan masyarakat dapat mengandalkan dan percaya bahwa hasil kebijakan terhadap program akan sesuai dengan janji yang telah saya buat”.⁶⁹

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erlinawaty bahwa:

“Strategi yang dilakukan caleg perempuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada masyarakat dan pemberdayaan kepada perempuan untuk mengetahui dan menggunakan hak-hak yang dimiliki. Pelatihan ini akan menyadarkan masyarakat untuk mengubah perspektif yang salah tentang politik, seperti pelatihan kepekaan gender, pembelaan hak-hak perempuan dan sebagainya”.⁷⁰

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ida Susanti, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Erlinawaty, DPRK Kabupaten Pidie Pada Tanggal 18 Agustus 2023

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para anggota DPRK Pidie dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat maka strategi yang dilakukan oleh calon legislatif adalah dengan memiliki kemampuan atau kinerja yang baik dalam mentransformasikan aspirasi, kemampuan anggota dewan dalam bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan mereka dan menyetujui tindakan pemerintah secara wajar. Keperdulian terhadap masyarakat, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang telah diambil dan dapat diandalkan oleh masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan.

Keterwakilan perempuan di DPRK Pidie dituntut untuk selalu bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Dengan demikian untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya Kabupaten Pidie, maka caleg perempuan harus memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen dan berusaha mengubah stigma negatif tentang pemimpin perempuan seperti perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, perempuan yang dianggap emosional, tidak rasional dan tidak mampu mengambil keputusan merupakan salah satu faktor munculnya masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin perempuan.

Dengan adanya perwakilan perempuan di DPRK Pidie diharapkan dapat mewakili kepentingan dan aspirasi perempuan dalam pembuatan kebijakan publik. Perwakilan perempuan di DPRK dapat menjadi suara bagi masyarakat perempuan yang selama ini kurang terdengar dan memberikan perspektif yang berbeda dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, dengan adanya perwakilan perempuan di DPRK Pidie diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuatan

kebijakan publik. Perwakilan perempuan di DPRK dapat membawa perspektif yang berbeda dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kepentingan masyarakat khusus mewakili kaum perempuan. Kemudian dengan adanya keterwakilan perempuan di DPRK Pidie juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda perempuan. Karena jika memberikan contoh langsung seperti anggota DPRK perempuan yang aktif terlibat dalam komunitas, hal ini dapat memberikan contoh tentang bagaimana perempuan dapat sukses di dunia politik, dan mendukung pendidikan politik bagi perempuan muda.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRK perempuan di Kabupaten Pidie tahun 2019-2024 sangat penting karena mempengaruhi program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPRK Kabupaten Pidie. Dengan lebih banyaknya perempuan dalam posisi kepemimpinan di DPRK Kabupaten Pidie, kita dapat memastikan bahwa suara, kebutuhan, dan tujuan mereka didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan yang lebih inklusif dan progresif tentang isu gender, termasuk hak reproduksi, perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kesetaraan gender, dapat terwujud jika terdapat anggota DPRK perempuan di Kabupaten Pidie.
2. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap calon legislatif perempuan di DPRK Pidie, para politisi berupaya meningkatkan mutu calon legislatif perempuan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, memaksimalkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang, serta melaksanakan program pendidikan kesetaraan gender yang komprehensif melalui penjangkauan masyarakat dan kurikulum sekolah. Membentuk tim relawan yang kuat, meluncurkan kampanye, dan mensosialisasikan program kerja adalah tiga strategi utama yang diidentifikasi oleh penulis sebagai teknik yang digunakan oleh

anggota legislatif perempuan di DPRK Kabupaten Pidie, dari tahun 2019 hingga 2024. Selain itu, harus ada upaya untuk menunjukkan bahwa perempuan sama cakupannya dengan laki-laki dalam hal peran kepemimpinan.

5.2 Saran

Peneliti bermaksud untuk memberikan saran-saran berikut berdasarkan simpulan di atas:

1. Masyarakat harus disadarkan akan pentingnya representasi politik perempuan di DPRK Pidie dan perlunya meningkatkan kompetensi anggota Dewan perempuan. Hal ini dapat terwujud melalui upaya partai politik yang lebih mengutamakan dan memperhatikan kaum perempuan.
2. Calon legislatif perempuan diharapkan lebih banyak mengambil bagian dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu gender dan kualitas calon legislatif perempuan. Mereka juga akan berupaya meningkatkan kemampuan dan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan kewenangan mereka, semua itu dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik.
3. Lebih banyak penelitian dengan topik yang sama, dengan fokus pada kepercayaan publik dan kesetaraan gender di lembaga legislatif Kabupaten Pidie dari tahun 2019 hingga 2024, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pendidikan di masa mendatang, khususnya di Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-raniry.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amirullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Anugrah, Astrid. (2009). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.

Astuti, Santi Indra. *Representasi Perempuan Indonesia dalam Komunikasi Visual*

Dwiyanto, Agus. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jovani, A. *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Di Era Digital*.

Komariah, Aan dan Djam'an Satori. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.

Rahman, H. Abd dan Enny Radjab. (2017). *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.

Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. (A. R. Yuhelson(ed.)).

Sutopo. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar, Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

B. JURNAL/SKRIPSI

Adrianty, Adinda Amalia. (2019). Perempuan Dan Parlemen Studi Tentang Meningkatnya Perolehan Kursi DPR RI Perempuan Partai Golkar Pada Pemilu 2019.

Andini, Puspa. (2021). Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kecamatan Parenggean.

Andriana, N., Nuraini Siregar, S., Haris, S., Yanuarti, S., Putri, B., & Sandra Amalia, L. (2012). *Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi*

Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. In S. N.Siregar (Ed.), PT. Gading Inti Prima.

Anwar, Hairul. (2018). Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019. *Thesis Ilmu Politik.* Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Arballo, Cristina. (2018). *A Woman's Place is in Governance: Public Trust and The Rise of Female Leadership.* Thesis. Northridge: Universitas Negeri California.

Arlina, Feni. (2019). "Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No. 4

Fitri, A. (2019). Keterwakilan Kelompok Disabilitas Sebagai Perjuangan Politik Identitas Dalam Pemilu 2019. *Jurnal Transformative*, 5(2), 37-51.

Julita, Eka Nusya. (2020). Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024. *Skripsi.*

Jurnal IDEA. (2002). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah.* Jakarta: Internasional IDEA.

Rohim, Abd. (2013). Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009.

Ulbig, Stacy G. (2007). *Gendering Municipal Government: Female Descriptive Representation and Feelings of Political Trust*, *Journal Social Science Quarterly*, Volume 88, Number 5, December 2007. Sam Houston State University.

Wibowo, M Ganda Abdi. (2019). Hubungan Antara Persepsi Terhadap Korupsi Massal DPRD dengan Kepercayaan Politik (*Political Trust*). *Undergraduate thesis.* Untag 1945 Surabaya.

C. WEBSITE

<https://governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/59>

<https://pidiekab.go.id/pages/3/demografi>. Diakses tanggal 27 Desember 2023.

www.dukcapil.kemendagri.go.id. *Diarsipkan* dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 27 Desember 2023.

D. WAWANCARA

Erlinawaty, *DPRK Kabupaten Pidie*, Wawancara Pada Tanggal 18 Agustus 2023

Ida Susanti, *DPRK Kabupaten Pidie*, Wawancara Pada Tanggal 18 Agustus 2023

Faisal M.A, *Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie*, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2023.

Raudah, *Warga Gampong Kumbang Trueng Campli Kabupaten Pidie*, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2023

Kharniadi, *Kepala Kantor Camat Delima Kabupaten Pidie*, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2024

Fitriani, *Warga Gampong Kumbang Trueng Campli Kabupaten Pidie*, Wawancara Pada Tanggal 11 Juli 2024

Raudatul Aini, *Warga Gampong Kumbang Trueng Campli Kabupaten Pidie*, Wawancara Pada Tanggal 11 Juli 2024

Siti, *Warga Gampong Kumbang Trueng Campli Kabupaten Pidie*, Wawancara Pada Tanggal 11 Juli 2024

Teuku Saifullah.TS, *DPRK Kabupaten Pidie*, Wawancara Pada Tanggal 15 Agustus 2023



Lampiran 1 Daftar Caleg Terpilih Dapil 1-Dapil 5 Periode 2014-2019

1. Dapil 1 Periode 2014-2019

No	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Tgk. H. Ismail Abubakar	Partai Nasdem	605	Laki-laki
2.	Siti Hawa	Partai Keadilan Sejahtera	752	Perempuan
3.	Teuku Saifullah. TS	Partai Golongan Karya	2.335	Laki-laki
4.	Drs. M. Isa Alima	Partai Gerindra	465	Laki-laki
5.	Ir. Muhammad Ali	Partai Demokrat	658	Laki-laki
6.	Jailani H.M Yakob	Partai Aceh	2.384	Laki-laki
7.	Muhammad Jakfar	Partai Aceh	2.165	Laki-laki
8.	Antaruddin	Partai Aceh	1.496	Laki-laki

2. Dapil 2 Periode 2014-2019

No.	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Hj. Cut Metia	Partai Nasdem	399	Perempuan
2.	Khairil Syahrial	Partai Gerindra	4.528	Laki-laki
3.	T. Manyak	Partai Demokrat	735	Laki-laki
4.	Anwar, S.Pd.I.	Partai Aceh	4.307	Laki-laki
5.	Munahasyah, A.Md.	Partai Aceh	2.923	Laki-laki
6.	Anwar Sastra Putra	Partai Aceh	3.816	Laki-laki
7.	Iskandar	Partai Aceh	2.249	Laki-laki
8.	Muzakkir	Partai Aceh	3.559	Laki-laki

3. Dapil 3 Periode 2014-2019

No.	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Nursaadah, S.Ag.	Partai Nasdem	676	Perempuan
2.	Fadli A. Hamid, S.E	Partai Golongan Karya	1.362	Laki-laki
3.	Muhammad Saleh	Partai Gerindra	1.411	Laki-laki
4.	Usman M. Yusuf	Partai Aceh	3.130	Laki-laki
5.	Mahfuddin Ismail, S.Pd.I.	Partai Aceh	3.094	Laki-laki
6.	Rosmini, A.Md	Partai Aceh	3.210	Perempuan
7.	Isfandiari	Partai Aceh	3.241	Laki-laki
8.	Muhammad Ali	Partai Aceh	3.271	Laki-laki

4. Dapil 4 Periode 2014-2019

No	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Jamaluddin, S.P.	Partai Nasdem	308	Laki-laki
2.	H. Iskandar Siddiq	Partai Demokrat	632	Laki-laki
3.	Muhammad AR	Partai Aceh	4.038	Laki-laki
4.	Tgk. Iskandar Daud	Partai Aceh	2.515	Laki-laki
5.	Samsul Bahri A Wahab	Partai Aceh	5.119	Laki-laki
6.	Cut Aja Yusnidar, S.Pd.I.	Partai Aceh	1.969	Perempuan
7.	Abd. Rahman	Partai Aceh	3.865	Laki-laki
8.	Muhammad	Partai Aceh	4.106	Laki-laki

5. Dapil 5 Periode 2014-2019

No	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Tgk, H. Muhammad Ali, S.Ag	Partai Nasdem	1.633	Laki-laki
2.	Syarifuddin	Partai Golongan Karya	2.121	Laki-laki
3.	Ramzi	Partai Gerindra	927	Laki-laki
4.	Tgk. Fakhurrrazi, S.HI.	Partai Damai Aeh	899	Laki-laki
5.	Zainal Alsi	Partai Aceh	2.172	Laki-laki
6.	Elidawati	Partai Aceh	2.247	Perempuan
7.	Abdullah	Partai Aceh	2.346	Laki-laki

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 2 Daftar Caleg Terpilih Dapil 1-Dapil 5 Tahun 2019-2024

1. Dapil 1 Tahun 2019-2024

No	Nama Caleg	Partai	Jumlah Suara	Jenis Kelamin
1.	Cut Nur Azizah	Partai Demokrat	2.456	Perempuan
2.	Jailani M. Yacob	Partai Aceh	1.554	Laki-laki
3.	T. Zulkarnein	Partai Gerindra	2.440	Laki-laki
4.	T. Saifullah	Partai Golkar	1.817	Laki-laki
5.	Zulfazli	Partai Nanggroe Aceh	1.225	Laki-laki
6.	Abdul Manaf	Partai Daerah Aceh	779	Laki-laki
7.	Awaluddin	Partai Amanat Nasional	889	Laki-laki
8.	Fauziah	Partai Kebangkitan Bangsa	1.122	Perempuan

2. Dapil 2 Tahun 2019-2024

No.	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Anwar Sastra Putra	Partai Aceh	3.349	Laki-laki
2.	Zufrizal	Partai Gerindra	1.611	Laki-laki
3.	Ida Susanti	Partai Golkar	1.718	Perempuan
4.	Rachmad Anshar	Partai Demokrat	1.625	Laki-laki
5.	Nasrul Syam	Partai Amanat Nasional	2.128	Laki-laki
6.	Tgk. Muhammad Nur	Partai Nanggroe Aceh	1.661	Laki-laki
7.	Juwakir	Partai Daerah Aceh	1.270	Laki-laki
8.	Muhammad	Partai Aceh	1.366	Laki-laki

3. Dapil 3 Tahun 2019-2024

No.	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Mahfuddin Ismail	Partai Aceh	2.418	Laki-laki
2.	Fadli A Hamid	Partai Golkar	1.884	Laki-laki
3.	Kurniada	Partai Daerah Aceh	1.904	Laki-laki
4.	Muhammad Saleh	Partai Gerindra	2.916	Laki-laki
5.	Erlinawaty	Partai Demokrat	817	Perempuan
6.	Mahdi	Partai Amanat Nasional	1.108	Laki-laki
7.	Fauzi Jamil	Partai Nasdem	998	Laki-laki
8.	Ibrahim	Partai Aceh	2.013	Laki-laki

4. Dapil 4 Tahun 2019-2024

No.	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Muhammad	Partai Aceh	1.572	Laki-laki
2.	T Mirza Jamil	Partai Gerindra	2.350	Laki-laki
3.	Asnawati	Partai Golkar	917	Perempuan
4.	Zamzami	Partai Daerah Aceh	954	Laki-laki
5.	Hizbullah	Partai Amanat Nasional	1.867	Laki-laki
6.	Alwi	Partai Demokrat	1.176	Laki-laki
7.	Mansur	Partai Nanggroe Aceh	1.001	Laki-laki
8.	Al Hadi Agani	Partai Aceh	1.097	Laki-laki

5. Dapil 5 Tahun 2019-2024

No	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara	Jenis Kelamin
1.	Elidawati	Partai Aceh	1.544	Perempuan
2.	Syarifuddin	Partai Golkar	2.829	Laki-laki
3.	Abdullah	Partai Demokrat	1.823	Laki-laki
4.	Muhammad Khaizir	Partai Nanggroe Aceh	1.131	Laki-laki
5.	Muhifuddin	Partai Daerah Aceh	1.414	Laki-laki
6.	Abdullah Ali	Partai Nasdem	1.578	Laki-laki
7.	Rustina	Partai Gerindra	1.368	Perempuan
8.	Abdul Rauf	Partai Aceh	1.471	Laki-laki



Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Anggota DPRK Kabupaten Pidie

1. Apakah ada hambatan untuk duduk di parlemen ?
2. Apakah kuota 30% bagi perempuan itu sudah cukup?
3. Apakah sistem nomor urut yang dilaksanakan pada pileg 2019 itu sangat berpengaruh dengan peran perempuan di lembaga legislatif?
4. Untuk memenuhi kuota 30%, menurut ibu strategi apa yang harus dilakukan oleh caleg perempuan?
5. Bagaimana cara caleg perempuan meyakinkan masyarakat untuk dapat memilih mereka di pemilu?
6. Apa yang para caleg perempuan lakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat?
7. Hal apa yang mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen?
8. Apakah partai politik berperan penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen?
9. Apakah sistem patriarki yang saat ini masih dominan berpengaruh dengan peran perempuan di lembaga legislatif?
10. Kendala apa saja yang dihadapi perempuan dalam pemenuhan representasi 30%?

جامعة الرانري

AR - RANIRY
Wawancara dengan KIP Kabupaten Pidie

1. Nama-nama caleg perempuan dan total keseluruhan caleg perempuan peserta pileg periode 2019-2024?
2. Total suara sah masing-masing caleg perempuan peserta pileg periode 2019 Kabupaten Pidie?

Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara:

1. Umum:

- Bagaimana Anda melihat pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif?
- Menurut Anda, apa manfaat dari peningkatan representasi perempuan di legislatif?

2. Khusus untuk Anggota Legislatif Perempuan:

- Apa yang mendorong Anda untuk masuk ke dunia politik dan menjadi anggota legislatif?
- Apa tantangan utama yang Anda hadapi selama kampanye dan setelah terpilih?
- Bagaimana respons masyarakat saat Anda mencalonkan diri sebagai anggota legislatif?

3. Khusus untuk Anggota Legislatif Laki-laki:

- Bagaimana pandangan Anda tentang peningkatan jumlah perempuan di legislatif periode 2019-2024?
- Menurut Anda, apa kontribusi anggota legislatif perempuan terhadap proses legislasi di Kabupaten Pidie?

4. Untuk Tokoh Masyarakat dan Pemuka Adat:

- Menurut tradisi dan budaya di Kabupaten Pidie, bagaimana peran perempuan dalam kepemimpinan atau politik?
- Bagaimana respons masyarakat lokal terhadap perempuan yang aktif dalam dunia politik?

5. Untuk Aktivis Perempuan dan Organisasi Perempuan:

- Apa upaya yang telah dilakukan oleh organisasi Anda untuk mendorong keterwakilan perempuan di legislatif?
- Menurut Anda, apa faktor utama yang mempengaruhi peningkatan keterwakilan perempuan di periode ini?

6. Untuk Partai Politik:

- Bagaimana partai Anda melihat pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif?
- Apakah ada program khusus atau pendampingan yang diberikan kepada kandidat perempuan selama pemilihan?

7. Untuk Masyarakat Umum:

- Bagaimana pendapat Anda tentang perempuan yang menjabat sebagai anggota legislatif?
- Menurut Anda, apa yang mendorong masyarakat untuk memilih perempuan sebagai wakil mereka di legislatif?

8. Untuk Akademisi atau Peneliti:

- Dari perspektif Anda, apa faktor utama yang mempengaruhi peningkatan keterwakilan perempuan di Kabupaten Pidie periode 2019-2024?
- Bagaimana tren keterwakilan perempuan di Kabupaten Pidie dibandingkan dengan daerah lain di Aceh atau di Indonesia?

9. Untuk Media Lokal:

- Bagaimana media meliput kandidat perempuan selama pemilihan legislatif 2019-2024?
- Menurut pandangan media, apa yang menjadi daya tarik kandidat perempuan bagi pemilih di Kabupaten Pidie?

